



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor : 121 Tahun 2021

Tentang

PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR
DAN PEMBIMBING SKRIPSI

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Gasal 2021/2022 maka dipandang perlu ditetapkan Dosen dalam Penugasan Mengajar dan Pembimbing Skripsi bagi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Menetapkan** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 6. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 7. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
 8. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 10. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 404 tahun 2021 tentang Pedoman Penggajian bagi Pegawai UMJ dan Peraturan Rektor lainnya yang terkait;
 11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM PENUGASAN MENGAJAR DAN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

- Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan penugasan mengajar dan pembimbing skripsi Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, dengan memperhatikan ajuan dari Ketua Program Studi.
- Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud /diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 September 2021

Dekan,



Dr. Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak

NID : 20.931

Lampiran Keputusan Dekan FEB-UMJ

Nomor : 23 Tahun 2021

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BINSIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama Dosen : Dr. Gofur Ahmah, M.M..

NID : 20 809

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Auntansi Manajemen	Rabu	M	3	L	15.45
	Studi Kelayakan Bisnis	Jum'at	M	3	F	07.00
	Studi Kelayakan Bisnis	Jum'at	M	3	E	09.45
Penelitian	Judul:					
	1. Penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2. Penyusunan Cetak Biru dan Grand Design Sistem Informasi Kementerian Kesehatan Corporate University					
Pengabdian Masyarakat	Judul:					

Jakarta, 2 Februari 2021

Dekan,



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

NID. 20 931

PETA JALAN

**PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN
TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH 2022-2024**

Dr. Gofur Ahmad, MM.



**PETA JALAN
PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA
EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
TAHUN 2022-2024**

*Indonesia Sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM Unggul dan
Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2035*



DAFTAR ISI

Sambutan
Kata Pengantar
Tim Penyusun
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I : PENDAHULUAN

- 1 | A. Latar Belakang
- 7 | B. Tujuan
- 8 | C. Kerangka Penyusunan Peta Jalan
- 9 | D. Landasan Penyusunan Peta Jalan

BAB II : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- 10 | A. Arah Kebijakan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 16 | B. Arah Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 21 | C. Visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 23 | D. Komponen Strategis Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 25 | E. Manajemen Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

BAB III : PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- 31 | A. Milestone Pembangunan SDM dan Talenta
- 33 | B. Kluster Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 34 | C. Peta Standar Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 40 | D. Profil Kebutuhan Spesifik SDM Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 43 | E. Model Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

BAB III : RENCANA AKSI PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH TAHUN 2022-2024

- 45 | A. Rencana Aksi Kluster Keuangan Komersial Syariah
- 52 | B. Rencana Aksi Kluster Keuangan Sosial Syariah
- 58 | C. Rencana Aksi Kluster Industri Halal
- 64 | D. Rencana Aksi Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah



BAB 1



LATAR BELAKANG

Data Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MPESI) Tahun 2019-2024 memperlihatkan masih minimnya jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi hingga tahun 2018, yakni baru sekitar 231 orang. Di samping itu, data statistik perbankan syariah sebagaimana MPESI 2019-2024 juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas, yakni hanya sekitar 9,1 % pegawai bank syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Disparitas kualifikasi dan kompetensi pegawai pada industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana diungkap di dalam bisnis.com menggambarkan adanya kesenjangan jumlah lulusan yang mampu diserap oleh sektor ekonomi dan keuangan syariah. Sekitar 90% SDM yang bekerja di sektor ini bukan berasal dari lulusan program studi ekonomi Islam dan keuangan syariah. Hal ini diantaranya disebabkan karena lulusan tersebut tidak dilengkapi dengan kompetensi



teknis yang dibutuhkan industri. Sementara industri ekonomi dan keuangan syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada kemudian diberi pengetahuan dan keterampilan sedikit tentang ekonomi dan keuangan syariah, agar lulusan yang diterima tersebut dapat menjalankan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang pegawai.

Permasalahan lain yang melatarbelakangi penyusunan peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah adanya transformasi sistem kerja yang disebabkan karena pandemi covid-19 dan disrupsi teknologi informasi, yang mengakibatkan fungsi SDM secara fisik digantikan dengan fungsi kecerdasan buatan dan *piloting machine*.

Eksistensi pegawai bekerja di kantor sebagaimana sebelum pandemi, ke depan lebih mengedepankan kolaborasi cara bekerja secara *hibryd*, yakni dengan mengendalikan pekerjaan dari jarak jauh (*work remote*), memanfaatkan kecerdasan buatan dan otomasi untuk meminimalisasi peran orang sebagai penyelesaian pekerjaan.

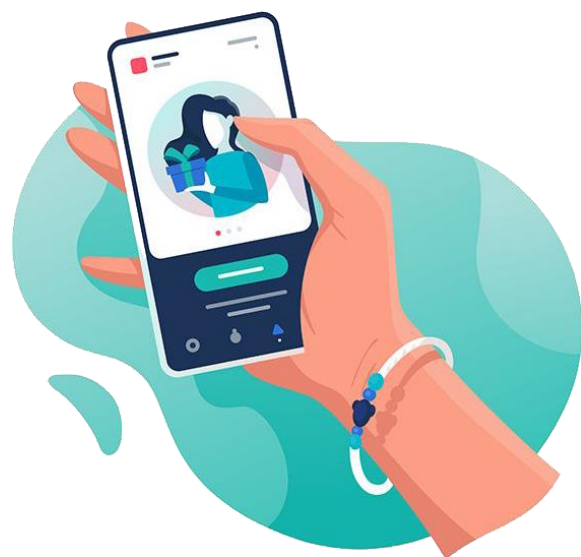


WORK FROM HOME

Dalam konteks ini, sektor perbankan sudah mulai mengarahkan perubahan orang ke dalam model bionik (*change people to bionic*) untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai rutin, statis, dan dapat diselesaikan

tanpa bantuan peran manusia sebagai penyelesai pekerjaan.

Disrupsi teknologi informasi selama beberapa tahun belakangan ini telah merubah persepsi dan perilaku masyarakat yang cenderung menjadikan *mobile apps* sebagai bagian dari gaya hidupnya. Perubahan mendorong industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah harus mampu mentransformasikan proses dan cara kerjanya ke arah digitalisasi yang dinilai lebih efisien, efektif, dan mampu merespon secara cepat kebutuhan dan keinginan masyarakat.



Terkait internalisasi pembangunan nilai-nilai syariah melalui peran tokoh agama dan ulama dinilai masih relatif minim. Pendekatan interaksi sosial berbasis religi melalui aktivitas dan komunitas keagamaan oleh praktisi ataupun pelaksana sektor ekonomi dan keuangan syariah cenderung normatif. Padahal peran ulama dan tokoh agama dalam peningkatan pemahaman Islam dan ghirah ke-Islaman sangat strategis, khususnya dalam membantu mempercepat dan memperluas cakupan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah semenjak dini. Pembangunan SDM semenjak dini memegang peranan penting untuk mewujudkan talenta syariah yang unggul, profesional, dan Islami.



Aset keuangan Syariah Global pada tahun 2019 telah mencapai US\$ 2,88 T, meningkat 14% dari tahun sebelumnya



Industri keuangan Syariah global diperkirakan terus tumbuh hingga mencapai US\$ 3,60 T pada tahun 2024



Perkembangan EKS: akselerasi transformasi digital, perbaikan rantai pasok global, peningkatan investasi keamanan pangan



Tahun 2019, Diperkirakan umat Muslim mengeluarkan US\$ 2,02 T untuk makanan, farmasi, dan gaya hidup sesuai Syariah*



Total nilai Investasi dalam EKS tahun 2019 mencapai US\$ 11,8 miliar, lebih dari 90% di antaranya dari sektor Makanan Halal dan Keuangan Syariah



Pertumbuhan keuangan Syariah pada tahun 2019 didominasi oleh Sukuk pada Arab Saudi, Malaysia, Iran, Qatar, Bahrain, dan UEA.

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020, Otoritas Jasa Keuangan

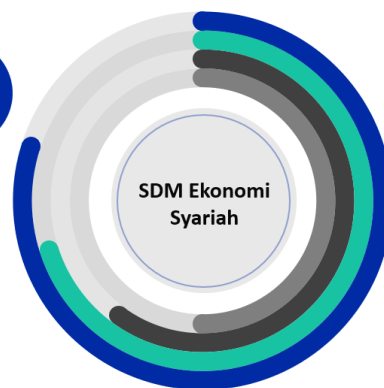
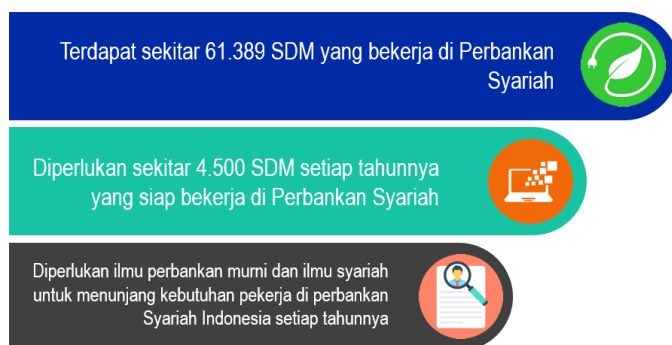
Tantangan pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keuangan syariah global. Merujuk laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2020, aset keuangan syariah global pada tahun 2019 telah mencapai US\$ 2,88 triliun meningkat sekitar 14% dari pencapaian tahun sebelumnya. Industri keuangan syariah global diperkirakan terus mengalami pertumbuhan hingga mencapai US\$ 3,60 triliun. Pada tahun 2019, umat muslim dunia diperkirakan telah mengeluarkan US\$ 2,02 triliun untuk belanja makanan, farmasi, dan gaya hidup yang sesuai

syariah. Total nilai investasi pada tahun 2019 di sektor ekonomi dan keuangan syariah telah mencapai US\$ 11,8 miliar, lebih dari 90% di antaranya berasal dari sektor makanan halal, dan keuangan syariah. Pertumbuhan keuangan syariah global pada tahun 2019 didominasi oleh Sukuk pada Arab Saudi, Malaysia, Iran, Qatar, Bahrain, dan UEA. Dalam peta ekonomi syariah global, Indonesia berada di peringkat ke-4 *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* pada tahun 2020/2021, terutama pada kriteria *Islamic Finance, Halal Food, Travel, Modest Fashion, Media & Recreation, dan Pharma & Cosmetics*.

Kondisi SDM ekonomi syariah Indonesia sebagai *enabler* (pengaktif) berdasarkan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Tahun 2020-2024 memperlihatkan adanya beberapa tantangan yang perlu mendapatkan penguatan, di antaranya terdapat sekitar 61.389 SDM yang bekerja di Perbankan Syariah dan diperlukan setidaknya sekitar 4.500 SDM setiap tahunnya yang siap bekerja di sektor Perbankan Syariah. Tingginya kebutuhan tersebut perlu diimbangi dengan jumlah dan kualitas SDM yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun pendidikan vokasi di jenjang menengah kejuruan.

3. perguruan tinggi harus menggalakan riset tentang SDM, agar hasil riset menjadi bermanfaat terhadap pengembangan industri.

Saat ini terdapat sekitar 78.156 institusi pendidikan berbasis Islam di Indonesia dari pra sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Jumlah pondok pesantren sekitar 25.938 dengan jumlah santri diperkirakan sebanyak 3,9 juta orang santri. Namun demikian, kurikulum pada program studi ekonomi syariah ataupun yang terkait lainnya, masih kurang dalam analisis kritikal maupun teknikal, sementara yang dibutuhkan industri adalah kemampuan analisa yang baik.



Dalam konteks ini, diperlukan ilmu perbankan murni dan ilmu syariah untuk menunjang kebutuhan pekerjaan di sektor perbankan syariah. Perguruan tinggi bersama para pemangku kepentingan harus merespons dengan melakukan harmonisasi terhadap muatan kurikulumnya agar lebih adaptif terhadap model pembelajaran yang dibutuhkan industri secara langsung.

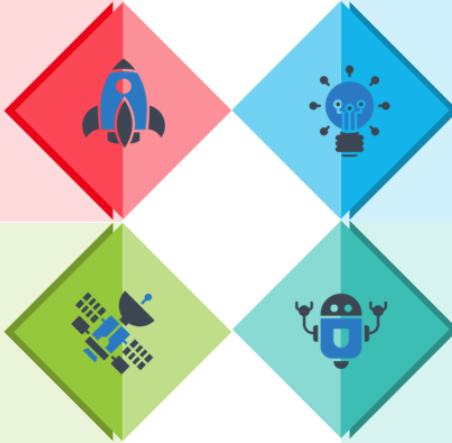
Dalam Rencana Implementasi disebutkan adanya 3 (tiga) faktor yang dapat berkontribusi ke dalam suksesnya pengembangan SDM ekonomi syariah, yakni:

1. mendisain kurikulum yang dapat memadai bobot ilmu syariah murni dan perbankan murni;
2. merekrut dosen yang berkualifikasi bidang ilmu ekonomi murni dan ilmu syariah;

Arah pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah juga didasari oleh adanya beberapa tantangan mewujudkan SDM kelas dunia diantaranya adalah pentingnya melahirkan SDM yang profesional, berintegritas, memiliki kemampuan *learning agility*, dan handal dalam satu penerapan sistem manajemen talenta berbasis sistem merit. Paradigma tata kelola pengembangan kompetensi SDM dalam upaya melahirkan karakteristik SDM tersebut juga perlu direkonstruksi, terutama pada model peningkatan kapasitasnya. Jika sebelumnya memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, maka ke depan dirubah arah tata kelola pengembangan kompetensi SDM melalui model pembelajaran terintegrasi.



Mewujudkan SDM yang **profesional, berintegritas, learning agility**, dan **handal** melalui: Penerapan **Manajemen Talenta berbasis Merit System**, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi sesuai prioritas pembangunan Ekonomi dan Keuangan Syariah



Pengembangan Pusat Talenta Syariah Nasional, melalui sistem Rekrutmen dan Seleksi, Pemetaan dan *Executive Searching*, Pembangunan Kelompok Talenta Syariah Nasional, implementasi *Human Capital Development Plan (HCDP)*, **transformasi tata kelola lembaga Diklat menjadi Sharia HC Corporate University**

Paradigma tata kelola pengembangan kompetensi SDM yang sebelumnya memfokuskan pada pendidikan dan pelatihan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai, dirubah arah tata kelola pengembangan kompetensi SDM melalui model **pembelajaran terintegrasi**

Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Unggul Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dilaksanakan melalui pendekatan sistem **pembelajaran terintegrasi (Corporate University) dan Skema Sertifikasi Khusus Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah**

Tantangan untuk menghasilkan Talenta Global Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah juga perlu diwujudkan melalui pembangunan Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, terutama pada bidang-bidang yang dinilai unggul dan mampu didorong untuk mencapai kualitas kelas dunia. Proses untuk menghasilkan talenta nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah dilakukan melalui serangkaian aktivitas strategis diantaranya: rekrutmen dan seleksi kandidat talenta berdasarkan kriteria talenta unggul, melakukan pemetaan dan *executives searching* di industri ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan dan pembinaan talenta yang dinilai potensial untuk meraih capaian global bidang ekonomi dan keuangan syariah, serta melakukan intensifikasi pembinaan talenta-talenta bidang ekonomi dan keuangan syariah semenjak dini.

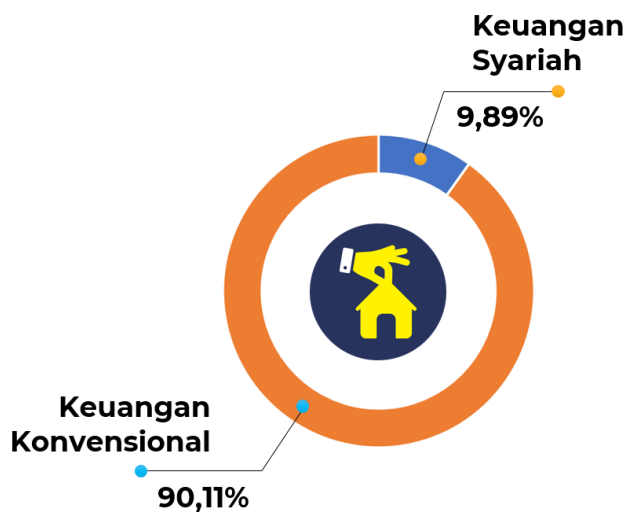
Guna mendukung pencapaian talenta global sektor ekonomi dan keuangan syariah diperlukan model pembelajaran terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku

kepentingan dari berbagai segmentasi dan klasifikasi usaha. Saat ini masih belum tersedia Pusat Pengembangan SDM dan Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah yang mampu mengintegrasikan seluruh metode pembelajaran, bahan ajar pengembangan kompetensi, serta integrasi keilmuan ekonomi dan keuangan syariah dengan ekonomi dan keuangan konvensional.

Identifikasi awal terhadap bidang-bidang pada sektor ekonomi dan keuangan syariah yang dinilai potensial untuk melahirkan talenta global sektor ekonomi dan keuangan syariah diantaranya adalah: Industri Makanan Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Fesyen, dan Digitalisasi dan Keuangan Sosial Syariah.



Berdasarkan Cetak Biru Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021-2025, guna mencapai *market share* keuangan syariah di atas 10% dari 9,89% *market share* jasa keuangan yang dicapai sektor keuangan syariah, perlu dilakukan pengembangan SDM di bidang keuangan syariah secara berkelanjutan. Sebagai catatan, saat ini komposisi *market share* adalah sekitar 90,11% dicapai oleh keuangan konvensional dan sekitar 9,89% dicapai oleh keuangan syariah.



Indikator potensial lainnya yang menjadi dasar dalam pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagaimana Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 adalah (1) belum adanya pengukuran skala usaha ekonomi syariah yang spesifik dan menjadi acuan nasional, (2) belum adanya pengukuran terhadap komponen industri halal dalam PDB Indonesia, khususnya PDB syariah, (3) belum adanya indeks Maqasid Syariah nasional dan internasional, serta (4) belum adanya indeks ekonomi syariah nasional. Selain itu, Pangsa pasar syariah sebesar 9,27% di skala usaha ekonomi syariah dan peringkat Indonesia di GIEI juga menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk dijadikan sebagai dasar pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Sejalan dengan itu, beberapa target ekonomi syariah tahun 2024 berdasarkan kondisi ekonomi syariah ditetapkan sebagai berikut:

SKALA USAHA EKONOMI SYARIAH

- ✓ Skala usaha ekonomi syariah naik 100% dalam 5 tahun;
- ✓ Pangsa pasar syariah mencapai 20% dalam 5 tahun.

EKONOMI MANDIRI

- ✓ Share ekspor industri halal terhadap PDB naik 100% dalam 10 tahun;
- ✓ Peningkatan swasembada pangan dan energi melalui share impor industri pangan dan energi turun 25% dalam 10 tahun.

PERINGKAT ISLAMIC ECONOMIC INDEX GLOBAL DAN NASIONAL

- ✓ Peringkat 5 besar GIEI;
- ✓ Indeks Ekonomi Syariah Nasional yang memuaskan.

INDEKS KESEJAHTERAAN

- ✓ Membangun Indeks Maqasid Syariah Nasional dan Internasional;
- ✓ Meningkatkan skor/kinerja dalam Indeks Maqasid Nasional dan Internasional.



TUJUAN

Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah bertujuan untuk:

1. mendukung pencapaian target Indonesia sebagai global hub pada tahun 2024 yang menempatkan SDM sebagai tulang punggung pengaktif (*enabler*) dengan milestone yang terencana, terstruktur, dan terarah dalam rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah yang holistik dan integralistik;
2. memberikan visi dan arah pengembangan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam skema pembangunan SDM yang komprehensif sejak dini, berkelanjutan, dan terus menerus, guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat rujukan global pembangunan SDM unggul dan talenta syariah;
3. mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk secara aktif, kolaboratif, dan partisipatif dalam membangun dan mewujudkan SDM dan talenta yang unggul, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah guna meraih pencapaian target Indonesia sebagai global hub pada tahun 2024;
4. menyusun sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta strategi dan rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah.





KERANGKA PENYUSUNAN PETA JALAN

Kerangka metodologi penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah disusun berdasarkan mandatori arahan kebijakan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan sebagai model pembangunan SDM unggul dan talenta berkelanjutan. Pengembangan SDM diselenggarakan secara holistik integralistik, dengan menghubungkan antara proses internalisasi dini hingga pembelajaran sepanjang hayat (*long life education, learning,*

and development) untuk mencapai talenta yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Data primer dikumpulkan, diolah, dan dianalisis melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan anggota KNEKS dan pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh, diolah, dan dianalisis berdasarkan dokumen strategik





LANDASAN PENYUSUNAN PETA JALAN

Landasan penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai referensi utama penyusunan peta jalan adalah sebagai berikut.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024



MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019-2024



Masterplan Arsitektur
KEUANGAN SYARIAH
Indonesia



CETAK BIRU
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SEKTOR JASA KEUANGAN
2021 - 2025

KNEKS STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN MATERI EDUKASI UNTUK
PENINGKATAN LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

EKOSISTEM
INDUSTRI
HALAL

RENCANA KERJA
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
2020-2024





BAB 2



BAB II

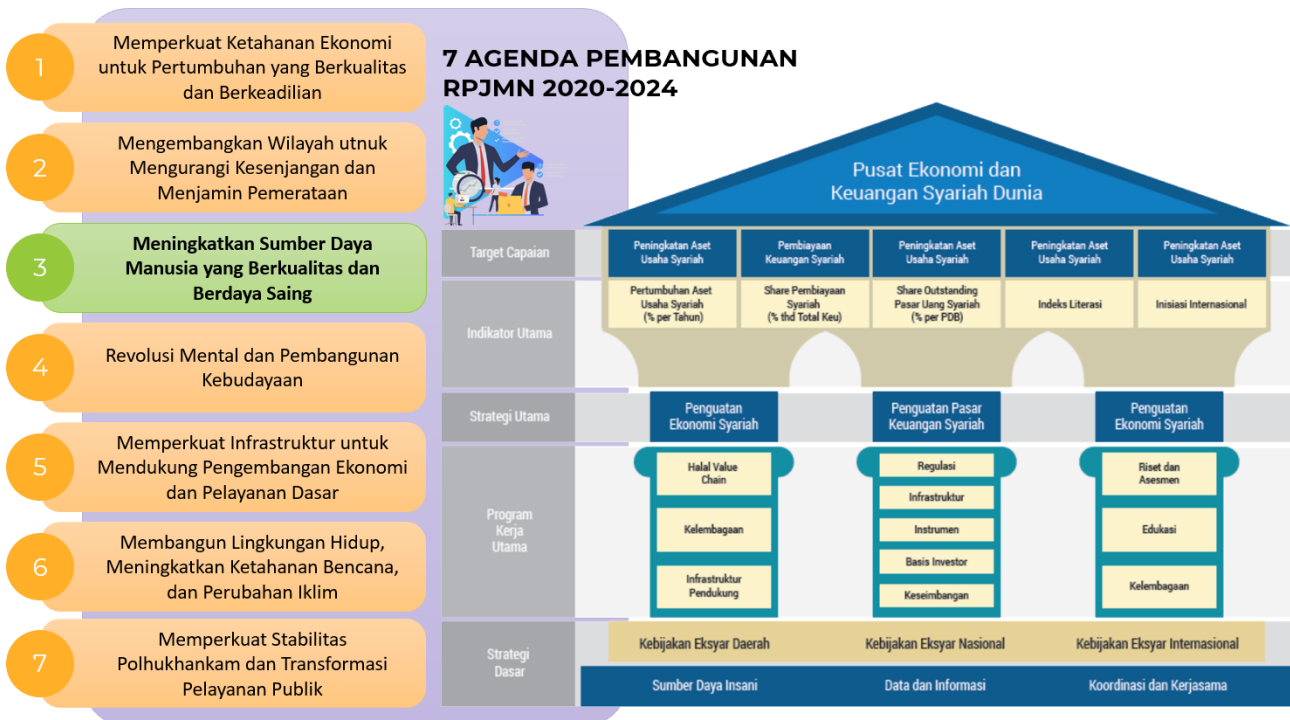
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 merupakan upaya pemerintah secara terencana untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Fokus pembangunan SDM unggul menjadikan manusia sebagai modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Komitmen pembangunan SDM unggul yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter guna meningkatkan indeks produktivitas dan daya saing bangsa.

Dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia pembangunan modal SDM yang terintegrasi merupakan strategi utama dalam menopang pertumbuhan industri keuangan syariah. Secara lebih khusus, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 juga mendudukkan posisi strategis SDM sebagai bagian penting dari ekosistem dan strategi dasar pembangunan ekonomi syariah Indonesia. Kesiapan SDM dalam mendorong pertumbuhan di sektor ini merupakan salah satu modal dasar untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan visi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekosistem pembangunan ekonomi syariah yang kondusif berdasarkan Masterplan Ekonomi



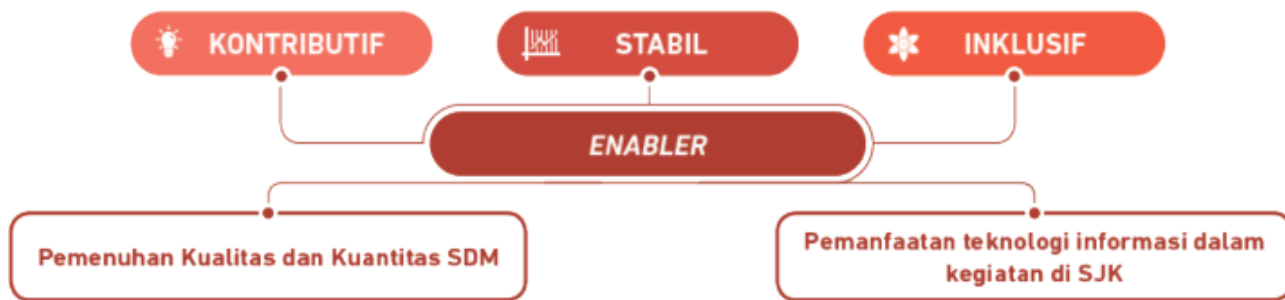
Syariah Indonesia 2019-2024 tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui strategi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ekonomi syariah, baik di lembaga pendidikan, lembaga sosial-keagamaan, maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Tujuan dan Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (SJK) Indonesia menurut Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tahun 2021-2025 menjadikan kualitas dan kuantitas SDM unggul sebagai salah satu *enabler* (pengaktif) bagi terwujudnya SJK yang stabil dan berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, dalam rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat Keuangan Syariah dunia, SJK memiliki strategi untuk memaksimalkan peningkatan indeks inklusi keuangan syariah di Indonesia. Salah satu program strategis yang dilakukan adalah melalui penguatan kapasitas SDM Lembaga Jasa Keuangan Syariah dalam memasarkan produk keuangan syariah dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen.

unggul, serta berdayasaing nasional dan global; dan memenuhi *skill demand* dan *talent gap* SDM di SJK baik yang berasal dari bidang pendidikan, pelatihan, asosiasi, institusi maupun industri.

Untuk mendukung inovasi ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah menginisiasi program dan kebijakan sistem pembayaran yang aman, lancar, dan efisien yang mampu memitigasi potensi risiko dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Salah satu program dan kebijakan yang dilakukan adalah melalui pengembangan layanan keuangan digital syariah sejalan dengan prinsip pengembangan layanan keuangan digital *Blue Print* Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025. Dalam upaya pengembangannya, terdapat empat aspek untuk mendukung keberhasilan dari pengembangan layanan pembayaran digital syariah di Indonesia, salah satunya adalah aspek Sumber Daya Manusia.

Faktor kunci keberhasilan pengembangan layanan pembayaran digital syariah di



Gambar 2.1
Tiga Arah Pengembangan Dalam MPSJKI yang
Menjadikan SDM sebagai Salah Satu Enabler
Sumber: MPSJKI Tahun 2021-2025

Secara lebih khusus, *Roadmap/Kerangka* Pengembangan SDM SJK akan memfokuskan program peningkatan kapasitas SDM SJK untuk meningkatkan awareness dan merubah mindset SDM SJK seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis SJK yang dinamis; menciptakan SDM SJK yang *agile*, kompetensi,

Indonesia pada aspek Sumber Daya Manusia ditentukan melalui upaya:

1. mendorong peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi dengan *concern* yang tinggi terhadap ekonomi dan keuangan syariah;

2. bekerjasama dengan lembaga pendidikan Islam dan/atau pesantren untuk menciptakan santri yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi;
3. peningkatan kapasitas SDM berkualitas tinggi melalui pelatihan teknis yang sesuai dengan kebutuhan industri;
4. membentuk linkage lembaga pendidikan dengan industri untuk menyalurkan peserta didik terbaik untuk mengembangkan karier di bidang informasi dan teknologi;
5. meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi terkait ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara umum.



Gambar 2.2
Faktor Kunci Pengembangan Layanan Pembayaran Digital Syariah

Sumber: Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2020

Tiga dari tujuh agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024 yakni (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, (2) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dan (3) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki implikasi strategis bagi pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Agenda memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memiliki indikator yang sejalan dengan arah pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor

ekonomi dan keuangan syariah, yakni peningkatan inovasi yang merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan mensejahterakan secara adil dan merata.



Gambar 2.3
Internalisasi Agenda Prioritas RPJMN IV 2020-2024 Ke Dalam Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Eksyar

Pada agenda pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, indikator yang sejalan dengan arah pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Dalam perspektif ini, arahan kebijakan makro yang harus diterjemahkan ke dalam program strategis pembangunan SDM unggul dan manajemen talenta adalah peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya di layanan pendidikan dan pelatihan untuk program studi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta peningkatan produktivitas dan daya saing.

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN IV Tahun 2020-2024 Agenda 1 Sebagai Referensi Analitis Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Rasio kewirausahaan nasional	3,55%	3,95%
2	Rasio wirausaha berbasis peluang	10,30	11,13
3	Pertumbuhan wirausaha baru	3%	4%
4	Jumlah sentra IKM baru di luar Jawa yang beroperasi	10 sentra	50 sentra (kumulatif)
5	Kontribusi usaha sosial	1,90 PDB	2,50 PDB
6	Penumbuhan start-up	700 unit (kumulatif)	3.500 (kumulatif)
7	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp 1.305 – Rp 1.307 T	Rp 1.840 – Rp 1.890 T
8	Kontribusi ekonomi kreatif	3,17%	4,66%
9	Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi	7,12% – 7,54%	7,54% – 8,78%
10	Nilai transaksi <i>e-commerce</i>	Rp 260 triliun	Rp 600 triliun
11	Penyediaan lapangan kerja pertahun	2,7 – 3,0 juta orang	2,7 – 3,0 juta orang
12	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	19 juta orang	21 juta orang
13	Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK	8.500 orang	15.000 orang
14	Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	30 perusahaan	60 perusahaan

Berdasarkan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel 1.1, setidaknya pemerintah telah menargetkan sekitar 4% terjadinya pertumbuhan wirausaha baru, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah untuk berkontribusi dalam mencapai angka pertumbuhan tersebut. Kumulatif penambahan start-up baru juga diharapkan mampu mendorong bisnis syariah di sektor ekonomi dan keuangan digital. Jika merujuk pada dokumen Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021-2025, salah satu misi pengembangan SDM sektor jasa

keuangan adalah “Mengembangkan SDM Sektor Jasa Keuangan yang Memiliki Kompetensi Digital” adalah sejalan dengan apa yang menjadi target pemerintah selama kurun waktu hingga tahun 2025. Target yang sejalan dengan pengembangan SDM unggul sektor ekonomi dan keuangan syariah lainnya adalah kontribusi usaha sosial yang dilakukan oleh kluster usaha keuangan sosial syariah.



Tabel 2.2

Sasaran, Indikator, dan Target RPJMN IV Tahun 2020-2024 Agenda 2 Sebagai Referensi Analitis
Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah

No	Indikator	Target 2020	Target 2024
1	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	29,93% (Susenas 2017)	43,86%
2	Jumlah Perguruan Tinggi terakreditasi A	91	235
3	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	42,54 (Sakernas 2018)	52,1%
4	Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi	39,57% (Sakernas 2018)	50%
5	Jumlah lulusan pelatihan vokasi	915.671	2,8 juta
6	Lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	472.089 (BNSP 2017)	2.000.000
9	Persentase lulusan PT yang langsung bekerja	63% (Kemenristekdikti, 2017)	80%
10	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>World Class University</i> : a. Top 100 b. Top 300 c. Top 500	1 (UI) 2 (ITB dan UGM)	1 (UI) 2 (ITB dan UGM) 3 (IPB, Unair, dan Unpad)
11	Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional	16.147 (Kemenristekdikti, 2017)	36.500
12	Jumlah prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemenristekdikti, 2017)	243
13	Jumlah HKI yang didaftarkan dari hasil Litbang perguruan tinggi	762 (Kemenristekdikti, 2017)	1.849
14	Jumlah produk inovasi dari tenant perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemenristekdikti, 2017)	600
15	Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	52 (Kemenristekdikti, 2017)	210
16	Jumlah paten yang diberikan dan yang didaftarkan (<i>resident</i>)	790/1.362 (Kemenristekdikti, 2017)	1.000/3.000
17	Jumlah publikasi internasional yang dapat disitasi	72.146	150.000

Pada agenda 2 RPJMN 2020-2024, sejumlah sasaran, indikator, dan target memiliki nilai strategis bagi penyusunan peta jalan pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah, di antaranya adalah target jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi, yang pada tahun 2024 ditargetkan mencapai sekitar 2.000.000 orang.

Di sektor ekonomi dan keuangan syariah, sasaran dan target ini menjadi sangat penting, terutama untuk mendorong seluruh pelaku industri di sektor ini agar dapat memainkan perannya dalam mendorong terselenggaranya SDM yang unggul melalui sertifikasi kompetensi bidang keuangan komersial syariah, keuangan sosial syariah, industri halal, serta bisnis dan kewirausahaan syariah. Sasaran dan target lain yang juga sangat penting bagi pengembangan

SDM unggul dan manajemen talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja, yakni sebesar 80% pada tahun 2024. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggara dan pengelola pendidikan tinggi yang memiliki program studi bidang ekonomi dan keuangan syariah, di mana tingkat serapan lulusan di industri yang linier dengan keahlian pendidikannya masih relatif rendah. Pelaku industri di sektor ekonomi dan keuangan syariah lebih suka menerima lulusan dari latar belakang pendidikan non ekonomi dan keuangan syariah, ketimbang lulusan dari bidang yang linier dengan usaha di sektor syariah.



Prospek pencapaian target yang rasional pada RPJMN 2020-2024 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sektor usaha ekonomi dan keuangan syariah untuk mendorong peningkatan SDM unggul yang memiliki talenta untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai global hub di bidang syariah pada tahun 2024.



GERAKAN *Revolusi* NASIONAL *Mental*

#AYOBERUBAH integritas•etos kerja•gotong royong

Sedangkan pada agenda revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, indikator yang sejalan dengan arah pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan yang memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Dalam perspektif ini, arahan kebijakan makro yang harus diterjemahkan ke dalam program strategik pembangunan SDM unggul di antaranya:

1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan dan pelatihan sektor ekonomi dan keuangan syariah; dan
2. Revolusi mental dalam sistem sosial, sebagai upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.



ARAH PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta pada kluster keuangan komersial syariah diformulasikan berdasarkan pada strategi dan arah pengembangan di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, yang secara garis besar memiliki 4 (empat) program utama, yakni (1) menyelenggarakan TOT SDM keuangan syariah secara berkala dan berjenjang, (2) mengembangkan, harmonisasi, dan penyebarluasan modul pengembangan SDM keuangan syariah di perguruan tinggi, (3) serifikasi kompetensi dan penguatan IT yang terintegrasi, serta (4) mendorong berdirinya infrastruktur sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah yang mendapatkan lisensi dari BNSP ataupun akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

Rencana aksi yang disusun berdasarkan kebutuhan SDM industri untuk pengembangan

sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun IKNB syariah melingkupi pengembangan SDM di lini produk, jasa/layanan, teknologi dan sistem informasi produk dan jasa, serta tata kelola lembaga dan kepatuhan syariah. Beberapa strategi yang dijalankan dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah yang inline dengan pembangunan SDM unggul dan talenta di sektor ini di antaranya: konsolidasi perbankan syariah yang membutuhkan kriteria kompetensi kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, upaya masif untuk mendorong agar pemangku kepentingan di sektor pemerintah dan BUMN dapat menempatkan dananya di perbankan syariah, dan berbagai strategi lain yang sekiranya dapat menjadi referensi strategis dalam penyusunan peta jalan.



Hal penting lainnya yang menjadi landasan dalam penyusunan peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah adalah mandatori penyelarasan Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 (RIPES) dengan RPJMN pada agenda pembangunan SDM. Inisiatif strategis yang harus diturunkan dalam peta jalan adalah:

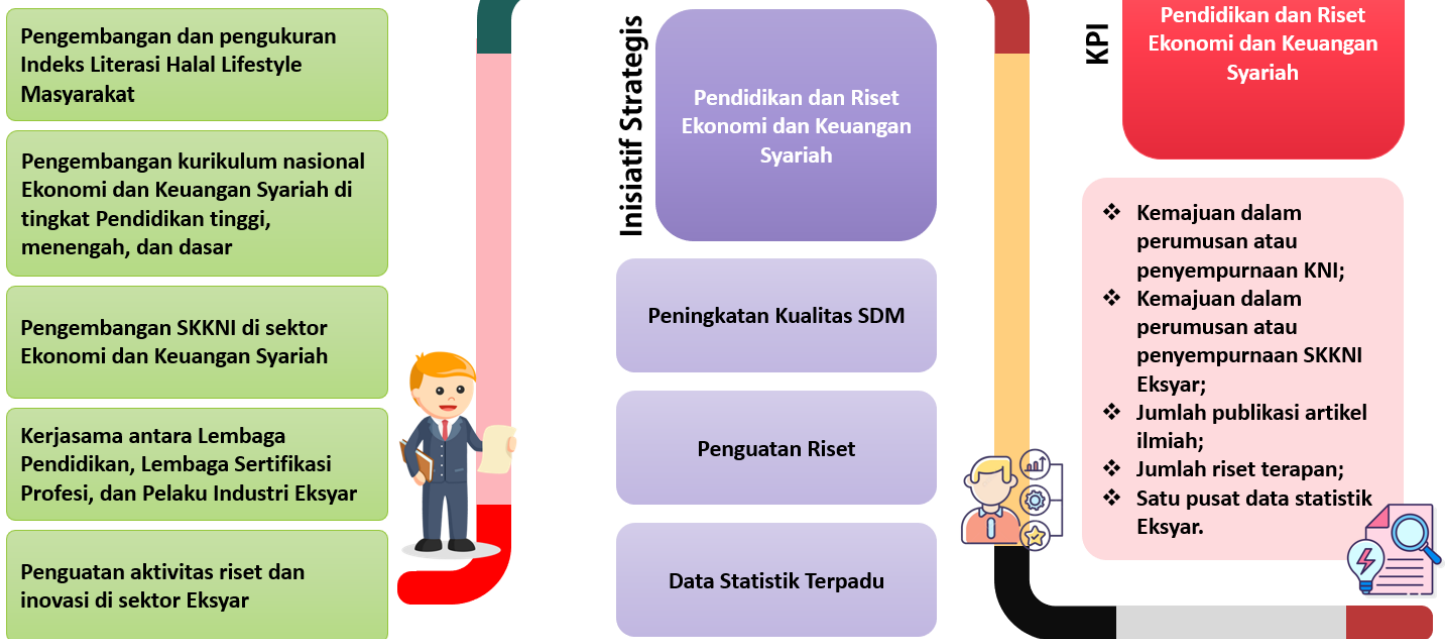
1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Penguatan riset;
3. Data statistik terpadu.

3. Jumlah publikasi artikel ilmiah;
4. Jumlah riset terapan;
5. Satu pusat data statistik ekonomi dan keuangan syariah.

Inisiatif strategis dalam pembangunan SDM unggul sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan RIPES 2020-2024 menekankan pada 3 (tiga) hal utama, yakni:

1. Penyelarasan dan Pengembangan Kurikulum Rumpun Ekonomi dan Keuangan Syariah;
2. Penataan Kompetensi SDM di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah; dan

Penyelarasan RIPES dengan RPJMN Pembangunan SDM



Sementara penancangan KPI pada inisiatif strategis “Pendidikan dan Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah” menitikberatkan pada:

1. Kemajuan dalam perumusan atau penyempurnaan KNI Ekonomi dan Keuangan Syariah;
2. Kemajuan dalam perumusan atau penyempurnaan SKKNI Ekonomi dan Keuangan Syariah;

3. Pengembangan Ekosistem Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Salah satu mandat yang harus dijalankan untuk mendukung rencana implementasi tersebut adalah penyusunan peta jalan pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta di sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam mengembangkan SDM dan talenta unggulnya secara profesional.

Arah pembangunan SDM sektor jasa keuangan sebagaimana Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021-2025 memiliki visi adalah “Mewujudkan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan yang Profesional, Berintegritas, dan Berdaya Saing Global dalam rangka Meningkatkan Kinerja Sektor Jasa Keuangan”.

Untuk mendukung pencapaian visi SJK, ada 4 (empat) misi utama yang akan dijalankan, yakni (1) mengembangkan standardisasi kompetensi SDM SJK, (2) mengembangkan metode peningkatan kompetensi SDM SJK, (3) mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan SDM SJK, dan (4) mengembangkan SDM SJK yang memiliki kompetensi digital.



Pada kluster industri halal, arah pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan peta jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2022-2024 yang menjadi program kerja utama

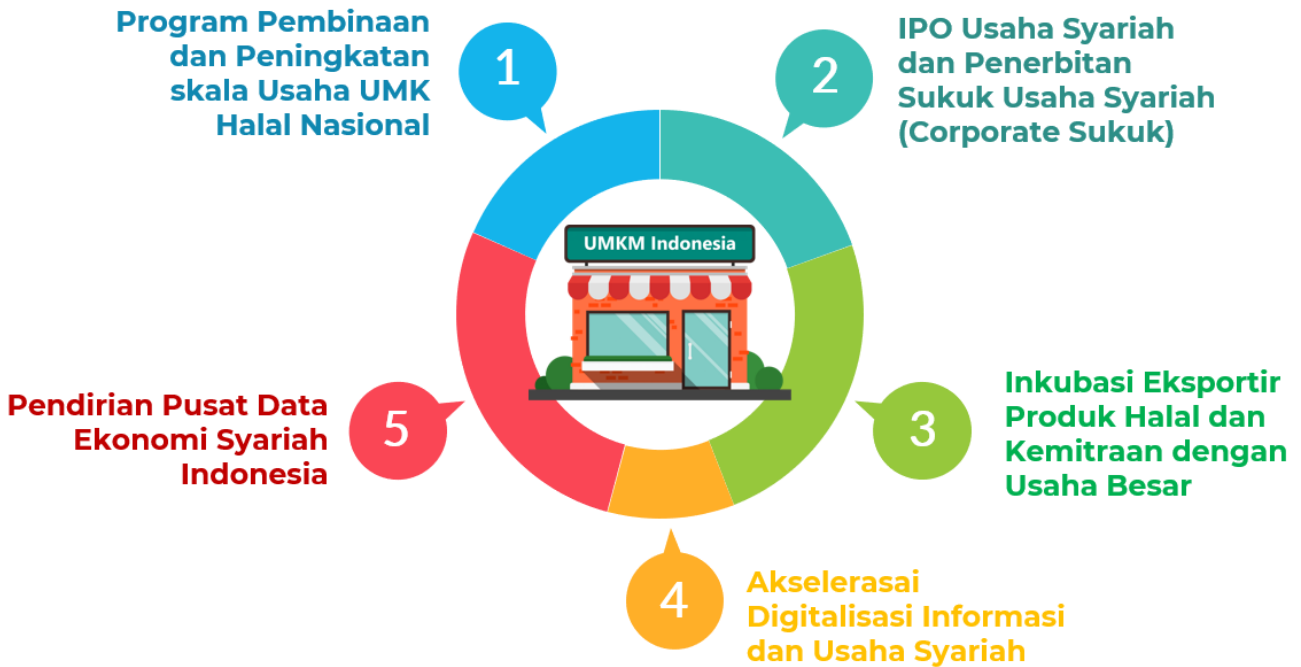
KNEKS tahun 2021-2024, meliputi (1) pengembangan infrastruktur dan kluster industri halal, (2) pengembangan standar halal, (3) peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan, sebagai berikut.



**Program Kerja Utama KNEKS
Tahun 2021-2024**

- ✓ Membangun Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH);
- ✓ Sertifikasi/Kodifikasi Halal Produk Eksport dan Halal *Traceability*;
- ✓ Pengembangan Halal Hub Port (Laut dan Udara);
- ✓ Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Nasional;
- ✓ Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal;
- ✓ Program Nasional Pembinaan Menuju UMKM Bersertifikasi Halal;
- ✓ Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim; dan
- ✓ Pengembangan Industri Kesehatan Syariah.

Arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja pada kluster bisnis dan kewirausahaan syariah meliputi 5 program kerja utama sebagai berikut.



Sedangkan arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja pada kluster keuangan sosial syariah meliputi 4 program kerja utama sebagai berikut.





VISI PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Global dalam Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah seyogyanya dilakukan semenjak dini. Internalisasi nilai syariah sudah mulai diberikan di jenjang pendidikan dasar dan pradasar hingga pendidikan menengah.

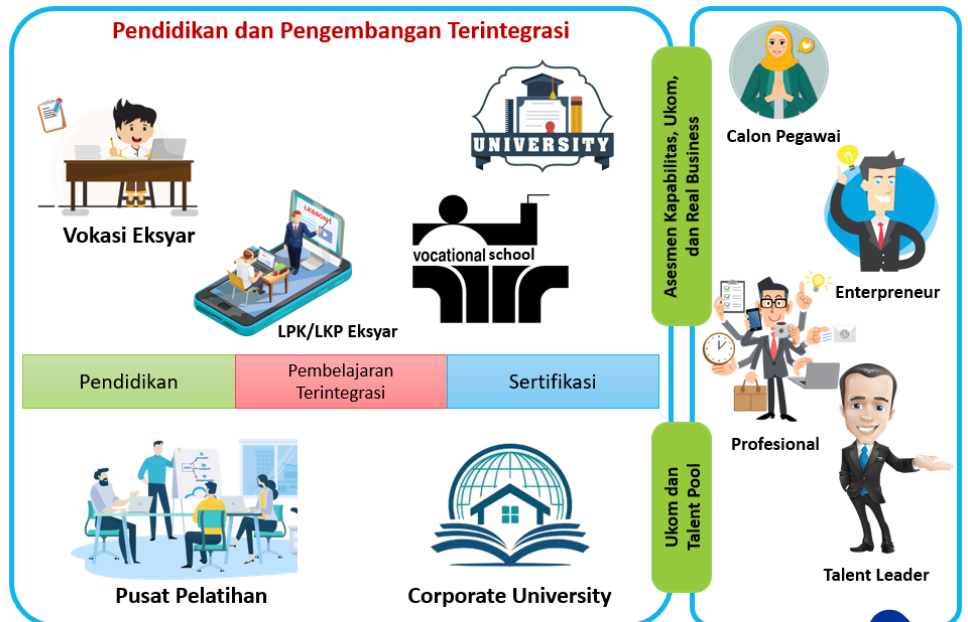
industri ekonomi dan keuangan syariah. Paradigma kebijakan Pembangunan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah harus menjadikan Pendidikan dan Pembelajaran sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Pembelajaran diselenggarakan secara integratif dan kriteria hasil pembelajaran



Internalisasi Nilai Syariah di Pendidikan Dasar dan Menengah



Penugasan, Penguatan, Penyetaraan, dan Peningkatan Kapasitas Kerja Syariah



LONG LIFE EDUCATION, LEARNING, AND DEVELOPMENT

Sementara saat masuk ke dalam jenjang pendidikan menengah kejuruan, sekolah vokasi maupun perguruan tinggi pendalaman materi dan keahlian diberikan secara faktual, dengan merancang program kurikulum terapan industri sebanyak 70% dan penanaman nilai-nilai syariah dan karakter SDM unggul yang tangguh diberikan sekitar 10%, sementara 20% lainnya adalah teori yang memperkuat basis terapan

adalah mampu menghasilkan talenta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri di sektor ini. Di jalur pengembangan kompetensi pegawai, penguatan diberikan melalui pusat pelatihan ataupun *corporate university* yang menekankan pada pembelajaran terintegrasi dengan tempat kerja, terutama untuk memperkuat nilai-nilai syariah bagi para pegawai.

Sehingga visi pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah sebagai berikut.



Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024, maka beberapa kriteria untuk menjadikan SDM syariah berkualitas kelas dunia perlu dijadikan sebagai rujukan, di antaranya: capaian kompetensi syariah yang bersifat generik bagi seluruh profesional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, harus memiliki kemampuan *learning agility* yang berkesinambungan, berintegritas tinggi, serta dapat diandalkan.

Untuk itu diperlukan penguatan infrastruktur pengembangan SDM unggul dan talenta ekonomi syariah yang terintegrasi dengan seluruh ekosistem pembelajaran yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat membentuk Pusat Pengembangan SDM dan Talenta Syariah Nasional melalui Pembangunan *National Sharia Corporate University*, yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.



KOMPONEN STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Pengenalan terhadap kondisi lingkungan strategis ekonomi dan keuangan syariah menjadi sangat penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif dan berkelanjutan. Komponen strategis pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah meliputi (1) ekosistem, (2) kebijakan, (3) sasaran strategis, IKU, dan target, (4) *core values*, dan (5) sistem monev. Ekosistem pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki kontribusi tinggi terhadap sukses pencapaian target SDM unggul di antaranya adalah pengembangan SDM unggul melalui pembelajaran terintegrasi (*sharia corporate university*) merupakan aktivitas yang mencerdaskan, *high impact*, menyenangkan serta berkelanjutan.

Pengembangan SDM unggul berbasis kompetensi yang terintegrasi dan berkelanjutan, berkorelasi secara kuat dengan sistem manajemen talenta yang perlu dikembangkan secara terencana dan struktural. Manajemen talenta dengan dukungan model pengembangan SDM yang tepat akan mampu mengelola big data eksekutif di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Komponen kebijakan dan regulasi memberikan landasan yuridis formal agar peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah mampu diselenggarakan secara kolaboratif dan semua pemangku kepentingan bersinergi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2024. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan

Ekosistem

1. **Pengembangan SDM Unggul** melalui Pembelajaran Terintegrasi (*Sharia HC CorpU*) merupakan aktivitas yang **mencerdaskan, high impact, menyenangkan** sesuai karakter masing-masing Kelompok Ekosistem EKS;
2. **Sistem Majamen Talenta Nasional** yang bersifat **terbuka**, untuk memperoleh Big Data **Top Sharia Executives**;
3. **Infrastruktur Pengembangan SDM dan Manajemen Talenta** yang **memadai dan mendukung** pembelajaran tanpa batas;
4. **Skema Kerangka Kualifikasi dan Kompetensi Nasional Syariah** sesuai Kelompok Ekosistem EKS



Sasaran Strategis, IKU, dan Target

1. Sasaran Strategis diturunkan berdasarkan **Visi Pembangunan Industri Syariah** dalam Arsitektur dan Lanskap Ekonomi dan Keuangan Syariah
2. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** di antaranya meliputi: Target Penyetaraan Kualifikasi para Karyawan dan Pelaku Industri di Sektor EKS, jumlah **SKKNI** dan Standar Kompetensi *Soft (Karakter)* pada masing-masing Kelompok Ekosistem, target perwujudan pencapaian kompetensi, jumlah pemetaan talenta, target pembentukan **Pusat Talenta Nasional**, target **Big Data SDM Unggul** dan **Talenta Sektor EKS**, dsb
3. **Milestone** dan **Rencana Aksi**



Kebijakan dan Regulasi

1. **Penyetaraan** Kualifikasi dan Kompetensi Bidang Syariah bagi Seluruh Pelaku Industri Syariah
2. **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** Bidang EKS berdasarkan Okupasi ataupun Profesi
3. **Pusat Pengembangan SDM** dan Talenta Syariah Nasional
4. **Sharia Human Capital Assessment Center**
5. **Karakter SDM Unggul** Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
6. Integrasi Keilmuan dan Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Sharia HC CorpU*)
7. **Sharia Big Data** dan **Pusat Sistem Solusi Terintegrasi**



Core Values

1. **The Six Sharia Competency**
2. Pengembangan fokus kepada kompetensi kerja, keterampilan lunak (*soft skill*) dan **pengembangan karakter** syariah
3. **Pengembangan SDM** berdasarkan Kerangka Kualifikasi dan Kompetensi yang Disepakati Industri



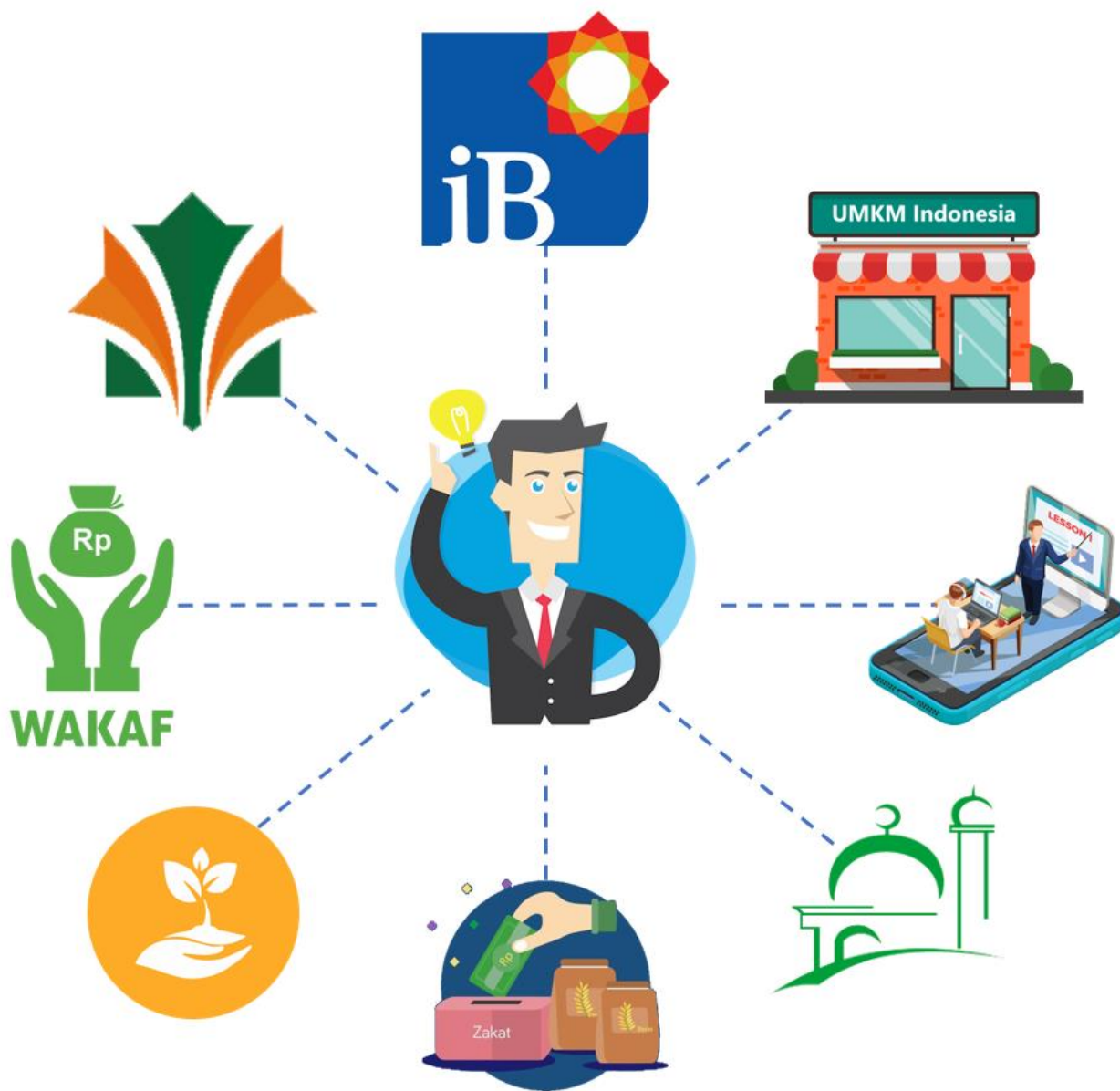
Sistem Monev

1. Monev bersifat **formatif/mendukung, Continuous Improvement**, dan **high impact**
2. Penilaian Suksse masing-masing Kelompok Ekosistem berdasarkan **portfolio**



di antaranya adalah penyetaraan kualifikasi dan kompetensi bidang syariah bagi seluruh pelaku di industri ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, 2 kebijakan penting yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian visi tersebut adalah: inisiasi kolaboratif antar pemangku kepentingan untuk membentuk Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah serta *Sharia Corporate University*, yang dapat diakses dan digunakan secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah dengan manajemen pengendalian yang terorganisir.

Sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah diturunkan berdasarkan Visi Pembangunan Industri Syariah, yang di antaranya meliputi: penyetaraan kualifikasi, jumlah SKKNI masing-masing kluster, target sertifikasi dan fasilitasi pembentukan lembaga sertifikasi profesi, penyelarasan dan integrasi kurikulum ekonomi dan keuangan syariah yang berorientasi industri, pembangunan big data SDM ekonomi dan keuangan syariah, pembangunan model talenta nasional bidang ekonomi dan keuangan syariah, dan lain sebagainya.





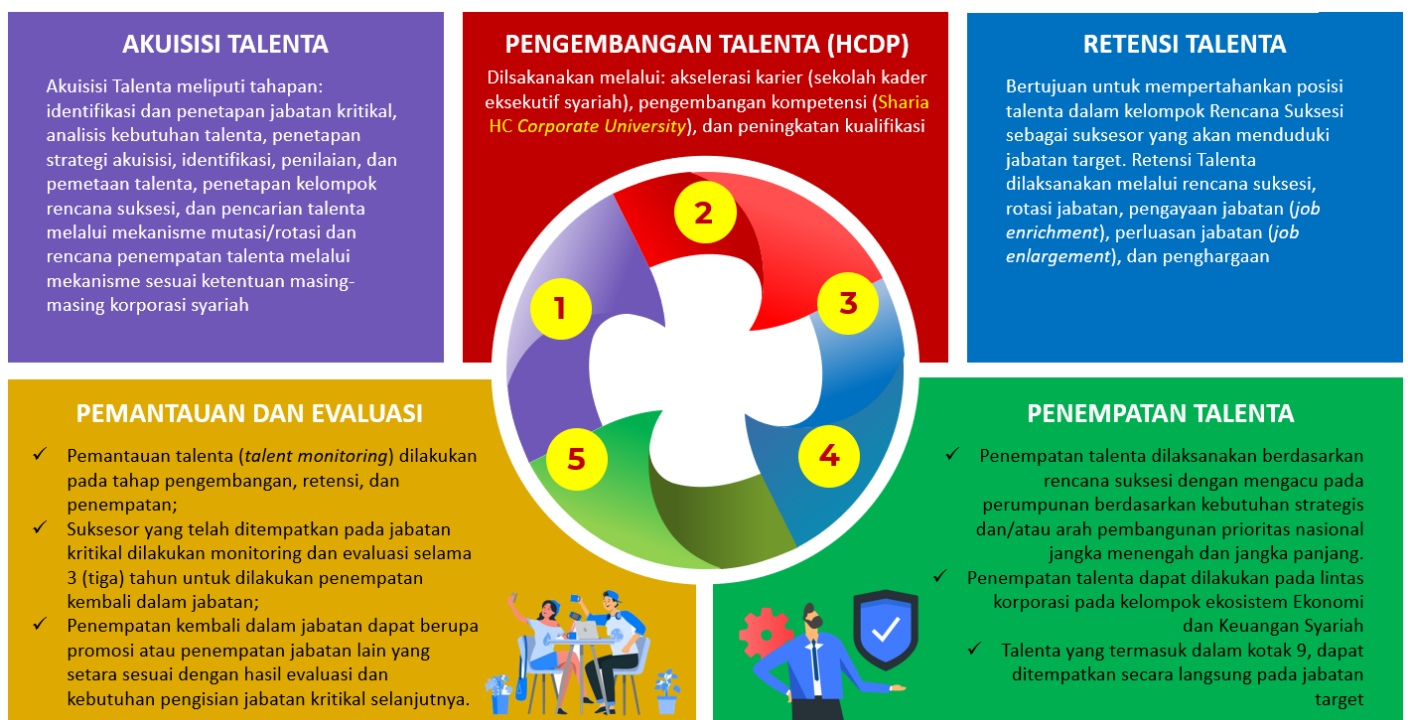
MANAJEMEN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

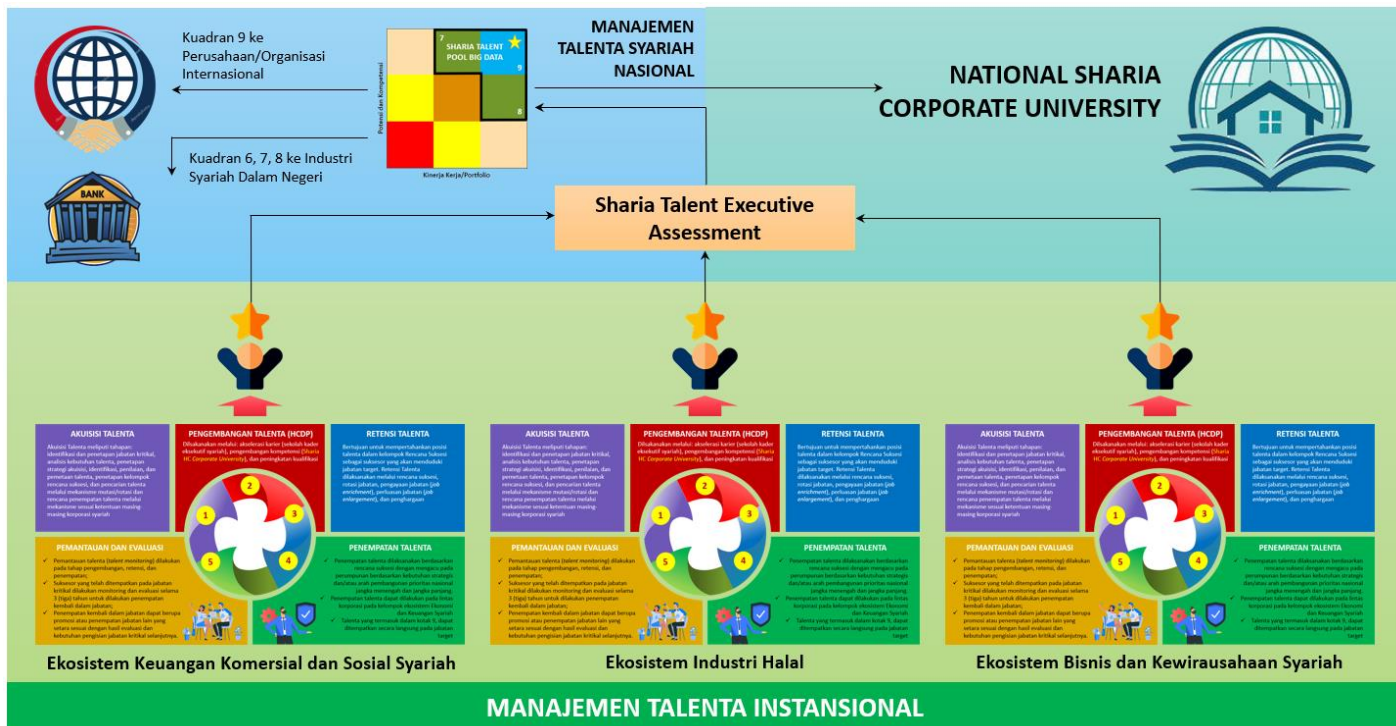
Kerangka pembangunan sistem manajemen talenta ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah harus dilakukan secara bersama, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Arah dari pembangunan manajemen talenta pada sektor ekonomi dan keuangan syariah adalah mengkoneksikan seluruh kekuatan potensial yang ada di masing-masing korporasi di dalam satu ekosistem manajemen talenta. Penyatuan dalam satu manajemen talenta berskala nasional nantinya dapat digunakan oleh seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dalam berbagai strata. Sehingga industri dalam skala mikro, kecil, dan menengah dapat mengakses, memanfaatkan, dan mendayagunakan model manajemen talenta untuk kebutuhan internal guna menghasilkan talenta-talenta di organisasinya.

Proses manajemen talenta secara organisasi untuk mendukung pencapaian target tersedianya talenta-talenta di masing-masing sektor, hingga talenta berskala global terdiri dari 5 (lima) tahapan, yakni:

1. Akuisisi Talenta;
2. Pengembangan Talenta;
3. Retensi Talenta;
4. Penempatan Talenta; dan
5. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Capaian Target Talenta.

Visi pencapaian Indonesia Sebagai Pusat Rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah perlu diwujudkan melalui penyatuan konsep dan model manajemen talenta dalam skala instansional hingga menyatu ke dalam skala nasional. Proses utama manajemen talenta secara instansional pada masing-masing ekosistem adalah:





1. **Attracting Talent:** mencari dan menarik pegawai terbaik yang memiliki potensi, kompetensi, dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. **Developing Talent:** mengembangkan pegawai terbaik berdasarkan hasil penilaian potensi dan kompetensi pada area (kuadran) *promotable* dan *rising star*;
3. **Retaining Talent:** memelihara dan mempertahankan *talent* agar senantiasa mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang organisasi.

Sistem manajemen talenta dibangun berdasarkan kebutuhan bisnis ataupun arah pengembangan organisasi pada masing-masing ekosistem, seperti: strategi bisnis/operasi, pertumbuhan, inovasi, kebutuhan pelanggan/masyarakat, efisiensi biaya, globalisasi, kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi, dan lain sebagainya. Penetapan sistem manajemen talenta harus terkait langsung dengan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing di pasar, atau strategi organisasi untuk mencapai kinerja pelayanan yang maksimal kepada masyarakat ekonomi dan keuangan syariah.



SASARAN STRATEGIS DAN IKU PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022 – 2024 menuju visi Indonesia Sebagai Pusat Rujukan, dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peta Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none">1. Peta kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah;2. Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
2	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none">1. Peta kebutuhan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan analisis KBLI 2020;2. Peta kebutuhan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri syariah;3. Peta kebutuhan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan adaptasi standar kompetensi internasional;4. Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah.
3	Penyusunan SKKNI Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan KBLI 2020, kebutuhan industri, dan adaptasi standar internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan SKKNI Bidang Keuangan Komersial Syariah;2. Pengembangan SKKNI Bidang Keuangan Sosial Syariah;3. Pengembangan SKKNI Bidang Industri Halal;4. Pengembangan SKKNI Bidang Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.

Lanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
4	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM di sektor keuangan komersial syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi keuangan komersial syariah; 2. Jumlah SDM di sektor keuangan sosial syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi keuangan sosial syariah; 3. Jumlah SDM di sektor industri halal yang mengikuti program penyetaraan kompetensi industri halal; 4. Jumlah SDM di sektor bisnis dan kewirausahaan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah.
5	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM di sektor keuangan komersial syariah yang mengikuti sertifikasi ahli sektor keuangan komersial syariah; 2. Jumlah SDM di sektor keuangan sosial syariah yang mengikuti sertifikasi ahli sektor keuangan sosial syariah; 3. Jumlah SDM di sektor industri halal yang mengikuti sertifikasi ahli sektor industri halal; 4. Jumlah SDM di sektor bisnis dan kewirausahaan syariah yang mengikuti sertifikasi ahli sektor bisnis dan kewirausahaan syariah.
6	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian pendirian LSP P3 sektor ekonomi dan keuangan syariah; 2. Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LSP P1, P2, dan P3 sektor ekonomi dan keuangan syariah; 3. Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Lanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
7	Pengembangan Kompetensi SDM sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Ekonomi dan Keuangan Syariah; 2. Pendirian <i>Sharia Corporate University</i> yang terintegrasi dengan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah; 3. Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah; 4. Inisiasi pembangunan platform belajar syariah yang terintegrasi dengan <i>Sharia Corporate University</i>; 5. Peta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sektor ekonomi dan keuangan syariah; 6. Inisiasi pembangunan platform pelatihan dan kursus syariah untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan penerima peserta Kartu Pra Kerja; 7. Jumlah SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring.
8	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inisiasi pembentukan Talenta Nasional sektor ekonomi dan keuangan syariah; 2. Pemetaan sektor ekonomi dan keuangan syariah yang berpotensi mencapai keunggulan global yang akan dikembangkan oleh Manajemen Talenta Nasional sektor ekonomi dan keuangan syariah; 3. Pembinaan talenta global sektor ekonomi dan keuangan syariah; 4. Pendampingan pencapaian global sektor ekonomi dan keuangan syariah; 5. Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Lanjutan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none">1. Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan dan belajar sepanjang hayat sektor ekonomi dan keuangan syariah;2. Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi, dan jenjang pendidikan tinggi untuk bidang ekonomi dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri ekonomi dan keuangan syariah;3. Fasilitasi pembangunan platform LMS sektor ekonomi dan keuangan syariah;4. Pembuatan materi edukasi literasi sektor ekonomi dan keuangan syariah;5. Inisiasi pembangunan KMS sektor ekonomi dan keuangan syariah;6. Pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, <i>success story</i> solusi masalah organisasi, yang akan diintegrasikan ke dalam KMS sektor ekonomi dan keuangan syariah;7. Profiling peta profesi yang mengalami disrupsi dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi;8. Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) sektor ekonomi dan keuangan syariah.



BAB 3



BAB III

PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



MILESTONE PEMBANGUNAN SDM DAN TALENTA

Milestone Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2022-2024 dengan target di akhir tahun 2024 “Indonesia Sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah serta Pusat Rujukan Global Halal *Value Chain*”, merupakan peta jalan menuju Indonesia Sebagai Global Hub Tahun 2024. Milestone Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah terkonsentrasi pada 4 (empat) tahapan utama yang menjadi koridor dari penjabaran masing-masing sasaran strategis pada jabaran target-target IKU hingga tahun 2024. Berikut adalah milestone pencapaian Visi Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021-2024.

Pencapaian Visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Global Pembangunan SDM dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024 diawali dengan program strategis peletakan pondasi SDM unggul dan talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2021, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk melakukan penguatan dan pemantapan karakter Islami SDM dan talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah yang profesional. Pada tahapan ini sejumlah program unggulan strategis dan rencana aksi dijalankan oleh pemangku kepentingan, mulai dari perancangan kebijakan pembangunan SDM, harmonisasi dan penyelarasan kebijakan antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM unggul dan talenta melalui program-program pengembangan kompetensi,





sertifikasi, dan pelatihan terintegrasi, hingga pemantapan dan program literasi nasional, dan berbagai program unggulan strategis lainnya yang akan dijabarkan secara spesifik di dalam program pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah tahun 2021-2024.

Pada tahun 2023 diharapkan *bridging* untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai pusat rujukan global pembangunan SDM dan talenta ekonomi dan keuangan syariah telah tuntas dilakukan dengan program standardisasi global. Untuk mewujudkan program standardisasi global tersebut yang harus dilakukan adalah dengan mengadaptasi standar kompetensi internasional ke dalam standar kompetensi kerja sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Adaptasi SKI juga diikuti dengan penggalan terhadap kompetensi berskala global pada kluster-kluster yang ada di dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah.

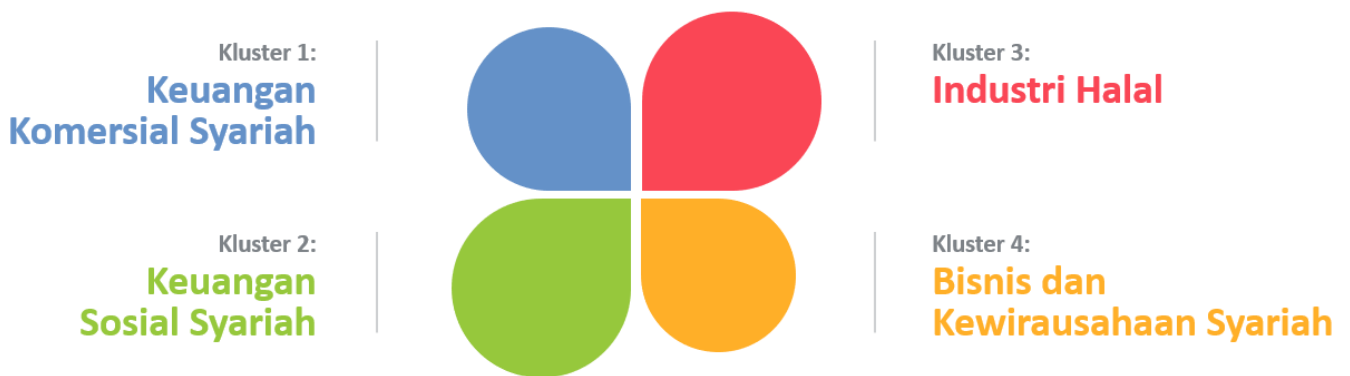
Milestone pencapaian pada masing-masing tahun perlu dikokohkan dengan sejumlah kajian, diseminasi, pemetaan kondisi eksisting, dan aspek yuridis peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta syariah, yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target hingga target besar di tahun 2024. Pembangunan terhadap sistem, kelembagaan, dan infrastruktur yang mendukung pencapaian target Indonesia sebagai pusat rujukan menjadi sangat penting untuk diselenggarakan secara berkesinambungan.



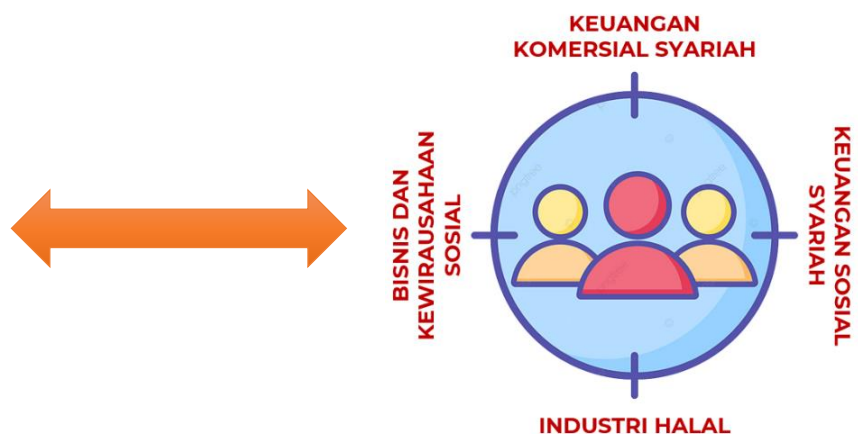
KLUSTER PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Agar dapat fokus dalam melakukan program Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah, penjabaran terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, target, alokasi waktu, program strategis, strategi, hingga kerangka pengendalian pencapaian dibagi menjadi 4 (empat) kluster utama, yakni sebagai berikut.

3. **Kluster Industri Halal**, yang meliputi: marketplace syariah, travel halal, farmasi dan komestik halal, makanan halal, fahion halal, media dan rekreasi halal dan ramah muslim, teknologi pangan dan kehalalan produk, halal supply chain, UMKM pangan Halal, serta industri pengolahan yang diproses melalui mekanisme halal;



1. **Kluster Keuangan Komersial Syariah**, yang terdiri dari ekosistem Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Industri Keuangan Non Bank Syariah;
2. **Kluster Keuangan Sosial Syariah**, yang terdiri dari ekosistem Pengelolaan Dana Haji, ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), Pengelolaan keuangan masjid, ormas, pesantren, dan keuangan sosial lainnya seperti LKMS, BMT, dan seterusnya;
4. **Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**, yang di antaranya meliputi: usaha ultra mikro syariah, UMKM industri halal, pemasaran syariah, ekspor produk halal UMKM, manajemen produksi dan operasi syariah, serta ekosistem digital ekonomi syariah.





PETA STANDAR KOMPETENSI SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Peta standar kompetensi sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk masing-masing kluster disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan kebutuhan industri masing-masing kluster dan ekosistem.

1. Kluster Keuangan Komersial Syariah



Kategori K
(Aktivitas Keuangan dan Asuransi)

Bank Umum Syariah

- ✓ Bidang Penghimpunan Dana Syariah
- ✓ Simpanan dan Investasi Syariah
- ✓ Jasa Sistem Pembayaran Syariah



Unit Usaha Syariah Bank Umum

- ✓ Bidang Penghimpunan Dana Syariah
- ✓ Simpanan dan Investasi Syariah
- ✓ Jasa Sistem Pembayaran Syariah

Manajer Investasi Syariah

PASAR MODAL SYARIAH

Penasihat dan Pengawasan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Syariah

Untuk Industri Keua/ngan Non Bank yang masuk ke dalam kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) berdasarkan KBLI 2020 meliputi:

- ✓ Asuransi;
- ✓ Reasuransi;
- ✓ Penjaminan;
- ✓ Dana Pensiun.



Aktivitas	Golongan Pokok	Bidang/Sub Bidang/Profesi
Asuransi	Asuransi	a. Jasa Pertanggungan
		b. Pengelolaan Risiko
	Penjaminan	Pemberian Jaminan Finansial
	Reasuransi	a. Pertanggungan Ulang Risiko
		b. Penjaminan Ulang Risiko
		c. Reasuransi Syariah
		d. Unit Syariah Reasuransi
	Dana Pensiun	a. Pengelolaan Program Pensiun
		b. Pertanggungan Pengelolaan Risiko
		c. Perhitungan Manfaat Asuransi
d. Asuransi Jiwa Syariah dan Unit Syariah Asuransi Jiwa		
e. Asuransi Umum Syariah dan Unit Syariah Asuransi Umum		



2. Kluster Keuangan Sosial Syariah

Berdasarkan KBLI 2020, bidang-bidang dan okupasi yang menjadi fokus pengembangan standar kompetensi pada kluster keuangan sosial syariah adalah sebagai berikut.

AKTIVITAS SOSIAL PENGUMPULAN DANA

pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan dana sosial, mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)



mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal)

3. Industri Halal

Berdasarkan KBLI 2020, bidang-bidang dan okupasi yang menjadi fokus pengembangan standar kompetensi pada kluster industri halal adalah sebagai berikut.

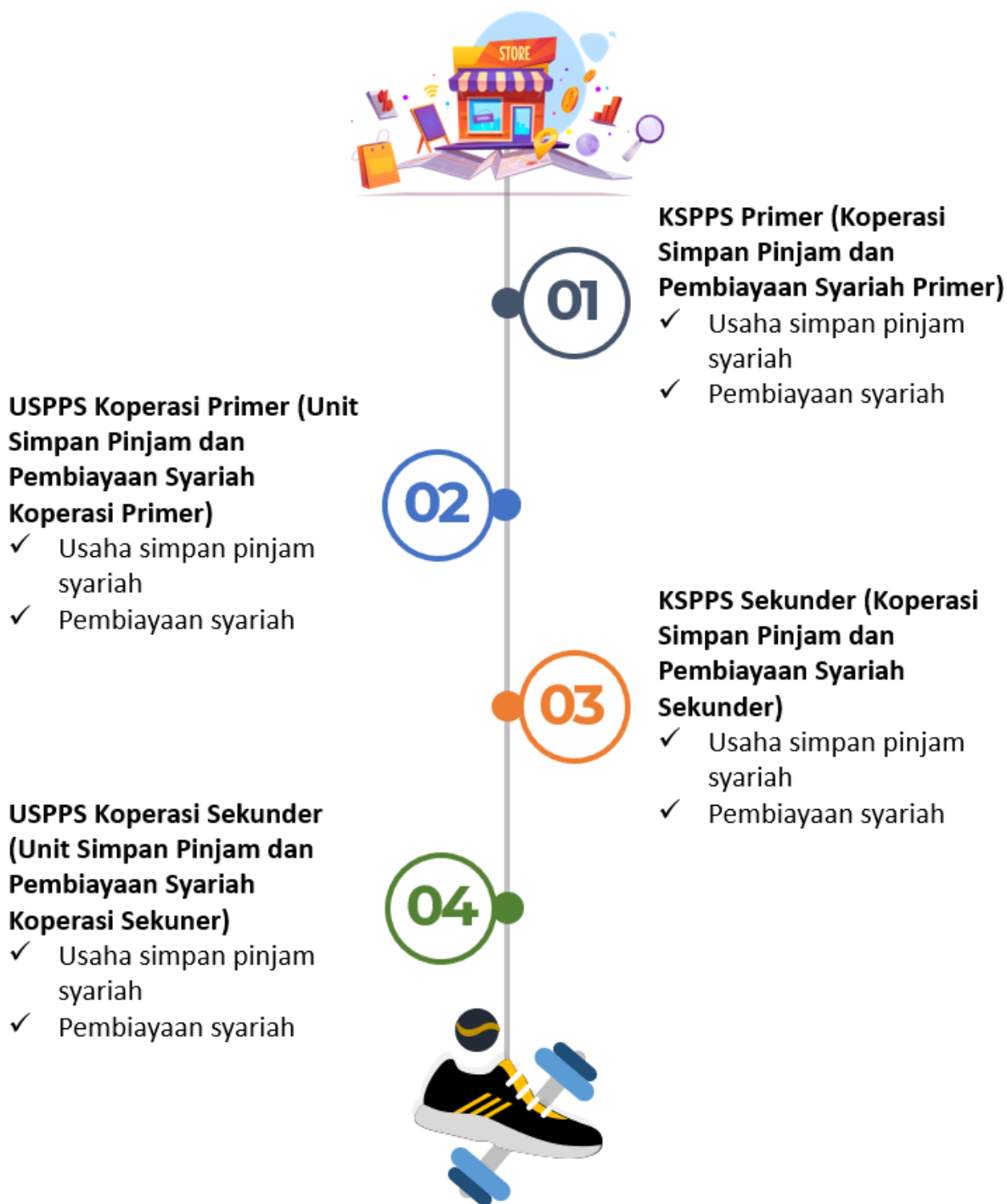
Tabel 3.1

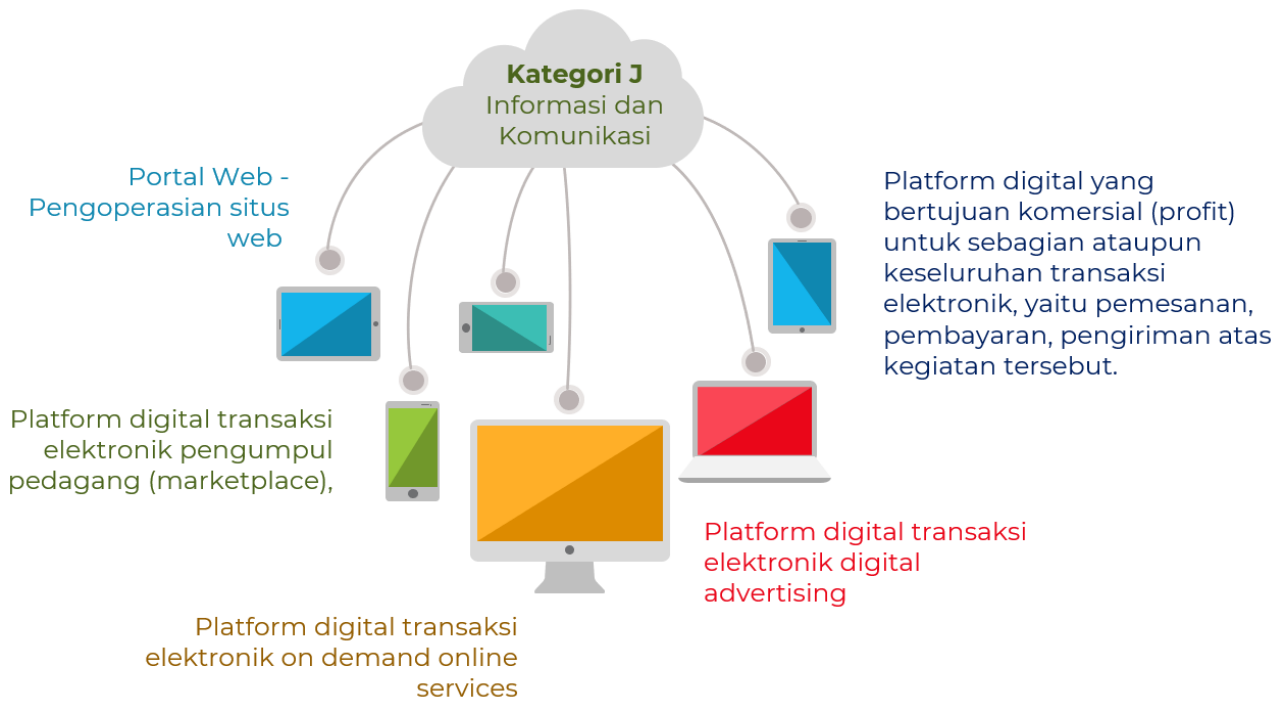
Peta Kompetensi Kluster Industri Halal pada Aktivitas – Golongan Pokok Industri Pengolahan

KATEGORI	GOLONGAN POKOK	GOLONGAN	BIDANG/OKUPASI	
Industri Pengolahan (C)	Industri Makanan (10)	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging (101)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengepakan dan Pengemasan Daging; 2. Pembekuan daging; 3. Daging yang dikeringkan; 4. Daging yang diasapkan/diasinkan; 5. Pengawetan daging; 6. Produksi olahan daging. 	
	Industri Minuman (11)	Industri Minuman (110)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan air minuman ringan dalam kemasan; 2. Pengemasan. 	
	Industri Tekstil (13)	Industri Pemintalan, Pertenunan, dan Penyempurnaan Tekstil (131)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengolahan serta tekstil; 2. Degreasasi dan karbonasi wol; 3. Retting tanaman tumbuhan serta tekstil. 	
	Industri Pakaian Jadi (14)	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya (141)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pakaian jadi; 2. Pembuatan barang-barang dari kulit berbulu; 3. Pembuatan rajutan dan sulaman. 	
	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional (21)	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia (2101)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemrosesan obat jadi; 2. Bioteknologi; 3. Pengolahan darah; 4. Pengolahan kelenjar; 5. Pengolahan obat kontrasepsi hormonal. 	
	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi (R)	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya (91)	Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya (910)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan daya tarik wisata budaya; 2. Pengelolaan cagar budaya atau bangunan bersejarah;
		Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya (93)	Aktivitas Rekreasi lainnya (932)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoperasian fasilitas dan menyediakan jasa rekreasi, taman hiburan, dst; 2. Fasilitas angkutan rekreasi; 3. Pengelolaan wisata alam; 4. Pengelolaan wisata buatan/binaan manusia; 5. Pengelolaan wisata tirta;

4. Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

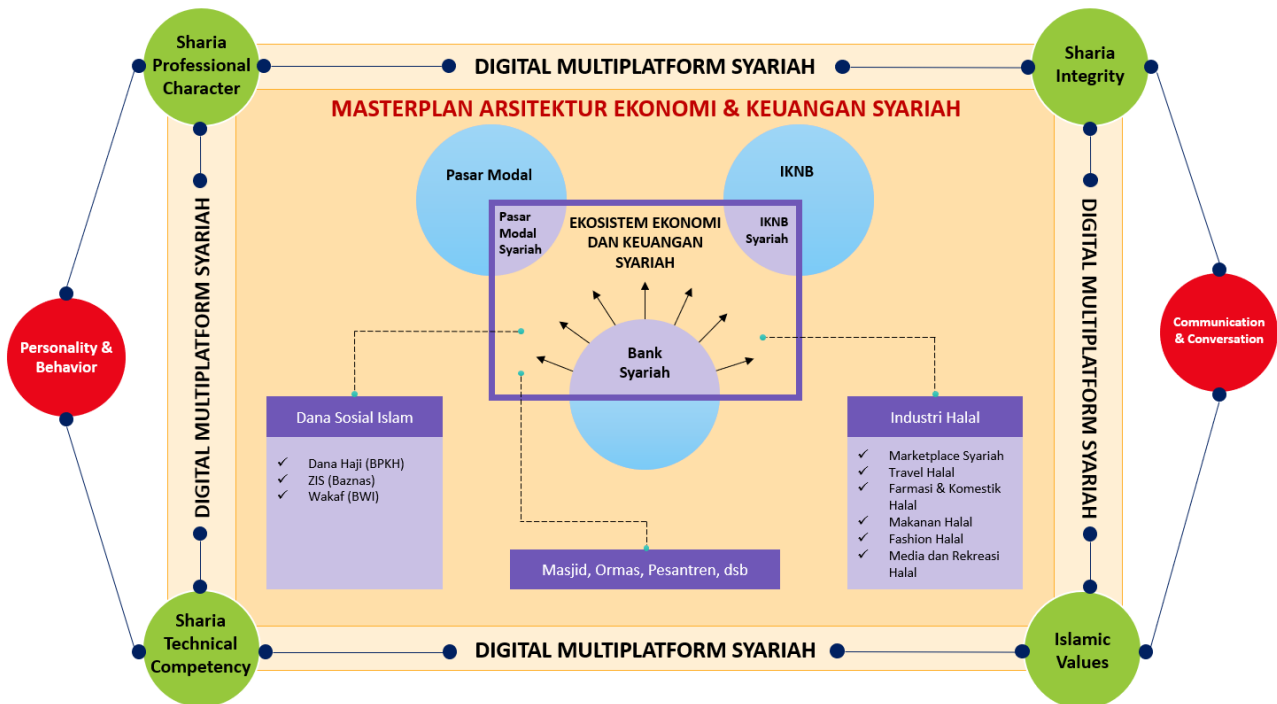
Berdasarkan KBLI 2020, bidang-bidang dan okupasi yang menjadi fokus pengembangan standar kompetensi pada kluster bisnis dan kewirausahaan syariah adalah sebagai berikut.





Platform digital yang mendukung pengembangan bisnis dan kewirausahaan syariah dapat mengakselerasi pencapaian target kinerja pada masing-masing ekosistem. Interaksi konektivitas antarpemangku kepentingan dilayani melalui layanan antar muka berbasis digital multiplatform.

Untuk itu dibutuhkan talenta digital yang memiliki penguasaan di bidang teknologi informasi, dengan karakter syariah yang kokoh agar mampu mendorong terselenggaranya ekosistem bisnis syariah yang shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah.





PROFIL KEBUTUHAN SPESIFIK SDM SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Kebutuhan spesifik SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah pada kluster keuangan komersial syariah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan industri meliputi: (1) SDM pada ekosistem perbankan syariah, (2) SDM pada ekosistem pasar modal syariah, dan (3) SDM pada ekosistem IKNB syariah.

Perbankan Syariah 	Pasar Modal Syariah 	IKNB Syariah 
<ul style="list-style-type: none">✓ Sertifikasi Standar Profesi secara bertahap (Komisaris, Direksi, Tenaga Ahli, dan DPS);✓ Manajemen Risiko Perbankan Syariah Tingkat I – III;✓ Pembiayaan Korporasi dan Sindikasi;✓ <i>Certificate in International Trade and Finance</i> (CITF);✓ <i>Wealth Management</i> untuk Nasabah Prioritas;✓ Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).	<ul style="list-style-type: none">✓ Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM);✓ Kompetensi Kesyariahan Pelaku Industri: Pengelola Syariah Online Trading System (SOTS), Manajer Investasi Portfolio Syariah, Underwriter Sukuk dan Surat Berharga Lainnya;✓ Pendampingan Calon Perusahaan Penerbit Efek Syariah;✓ Pernerangan Efek Syariah Pasar Modal.	<ul style="list-style-type: none">✓ Sertifikasi Standar Profesi yang Bertahap (Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas, Tenaga Ahli, dan DPS);✓ Kompetensi Kesyariahan Pelaku Industri IKNB Syariah;✓ Kompetensi dalam Bidang Investasi/Asset dan <i>Liability Management</i>;✓ Kompetensi dalam Bidang Risk Management;✓ Kompetensi Aktuarial dan Akuntansi Transaksi pada Asuransi Syariah (PSAK 108);✓ Kompetensi IT.



Kebutuhan spesifik SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah pada kluster keuangan sosial syariah serta kluster bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan industri meliputi: (1) SDM sektor zakat, (2) SDM sektor wakaf, dan (3) SDM sektor keuangan mikro syariah.

Zakatyuk wakafyuk

- ✓ SKKNI Nazhir, sebagai kolaborasi Kementerian Agama, BWI dan Forum Wakaf Produktif, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan, dengan harapan bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- ✓ SKKNI Amil terdiri atas 37 unit kompetensi yang meliputi pengumpulan, manajemen tata kelola harta benda wakaf, menjaga dan mengembangkan aset wakaf, menyalurkan hasil manfaat harta benda wakaf);
- ✓ Pengembangan yang perlu difokuskan antara lain (1) peningkatan jumlah asesor (2) peningkatan peserta sertifikasi, dan (3) biaya sertifikasi yang lebih terjangkau

- ✓ SKKNI Nazhir, sebagai kolaborasi Kementerian Agama, BWI dan Forum Wakaf Produktif, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan, dengan harapan bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat;
- ✓ SKKNI Amil terdiri atas 37 unit kompetensi yang meliputi pengumpulan, manajemen tata kelola harta benda wakaf, menjaga dan mengembangkan aset wakaf, menyalurkan hasil manfaat harta benda wakaf);
- ✓ Pengembangan yang perlu difokuskan antara lain (1) peningkatan jumlah asesor (2) peningkatan peserta sertifikasi, dan (3) biaya sertifikasi yang lebih terjangkau

Sertifikasi Kualifikasi Pengelolaan Keuangan Mikro Syariah

- Mendorong program-program pelatihan/sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah, Asosiasi/sekunder/APEX, BNSP, lembaga sertifikasi profesi maupun pihak lainnya. Melalui mekanisme ini akan mendorong para pengelola koperasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, apabila program ini dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten akan menjadi faktor yang signifikan terhadap penguatan institusi dan industri.
- Pusat Pelatihan dan Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah

Kebutuhan spesifik SDM sektor ekonomi dan keuangan syariah pada kluster industri halal berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan industri meliputi: (1) sertifikasi halal, (2) riset sains halal, dan (3) pelaku usaha produk halal,





MODEL PENGEMBANGAN SDM UNGGUL DAN TALENTA EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Pusat Rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024, dibutuhkan integrasi kolaboratif antar pemangku kepentingan di empat kluster pembangunan SDM dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah. Prinsip dari pengembangan SDM dan talenta yang dilakukan adalah saling memberikan dukungan, penguatan, dan kemudahan akses bagi pelaku usaha besar yang memiliki infrastruktur pembelajaran dan pengembangan kompetensi, untuk dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lainnya.

perlu dibangun Pusat Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah. Inisiasi dilakukan oleh KNEKS dengan melibatkan pemangku kepentingan di sektor pelaku usaha yang memiliki infrastruktur pembelajaran terintegrasi melalui *Sharia Corporate University*. Selain membangun *Sharia Corporate University*, perlu juga dibangun kolaborasi strategis untuk mengembangkan model penilaian kompetensi dan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah secara berkesinambungan dan saling sinergi, agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dapat ikut memanfaatkan



Perencanaan Model Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah



Pembangunan Pusat Pengembangan SDM Unggul dan Manajemen Talenta Syariah Nasional



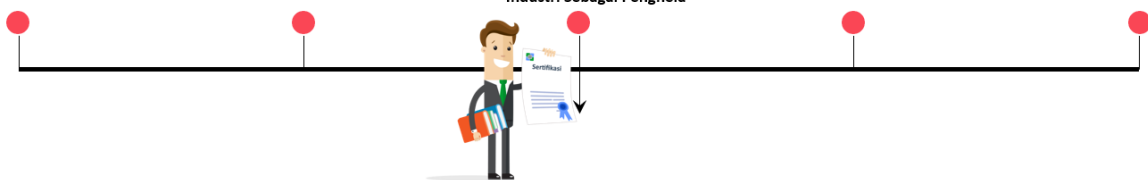
Integrasi Keilmuan, Kualifikasi, Kompetensi dari Seluruh Ekosistem Pembelajaran (PT, Sharia HC CorpU, Pusdiklat, LKP), dengan Menarik Kebutuhan Industri Sebagai Penghela



Pembangunan Pusat Sharia HC Assessment Center, Skema SKKNI, dan Fasilitas Lisensi LSP EKS dari BNSP dan/atau KAN



Sertifikasi Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah



SDM UNGGUL DAN BERSERTIFIKASI PROFESIONAL

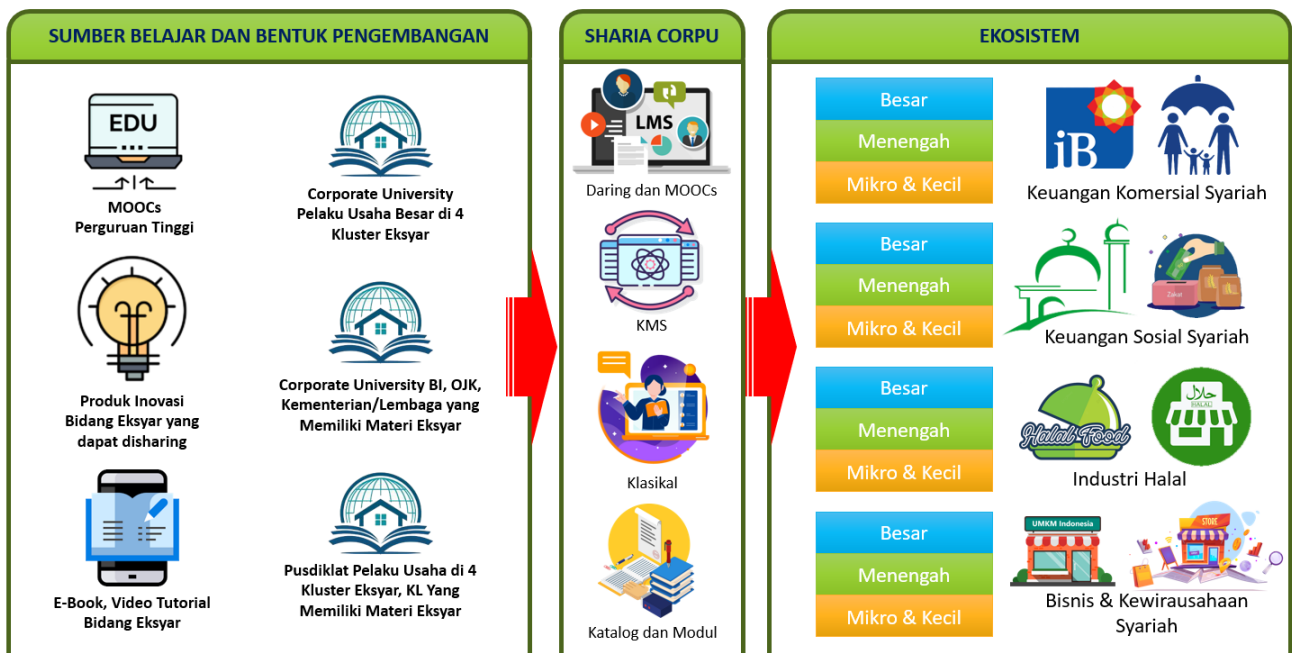


Kolaborasi menyiapkan SDM kompeten diawali dengan merancang model pengembangan SDM unggul dan talenta yang sesuai dengan karakteristik SDM dan talenta masing-masing kluster. Untuk menunjang kerjasasama kolaboratif antar pemangku kepentingan,

model fasilitasi ini. Integrasi keilmuan, kualifikasi, dan kompetensi dari seluruh ekosistem pembelajaran dilakukan dengan menarik kebutuhan industri sebagai penghela, bagi terselenggaranya sistem pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang dapat dinikmati seluruh pemangku kepentingan.

Model *Sharia Corporate University* menjadi pilihan terbaik untuk menyatukan ekosistem pembelajaran untuk pengembangan kompetensi syariah yang dapat diakses secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Para pelaku usaha di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang memiliki infrastruktur pembelajaran terintegrasi melalui

Corporate University, didorong untuk memberikan model dan sumber belajarnya ke dalam *Sharia Corporate University*. Selanjutnya melalui *Sharia Corporate University*, seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses sumber belajar dan ikut berpartisipasi dalam bentuk-bentuk pembelajaran yang dikembangkan.





BAB 4



BAB IV

RENCANA AKSI PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH



RENCANA AKSI KLUSTER KEUANGAN KOMERSIAL SYARIAH

Rencana Aksi kluster keuangan komersial syariah disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022-2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2024, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHUN			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A	Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Keuangan Komersial Syariah				
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
2	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Pasar Modal Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Keuangan Non-Bank Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
4	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor perbankan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
5	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor pasar modal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
6	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor IKNB syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
B	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Keuangan Komersial Syariah				
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKBN syariah berdasarkan analisis KLBI 2020	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKBN syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah

3	Pemetaan kebutuhan kompetensi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKBN syariah berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, BNSP, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan
C	Penyusunan SKKNI Sektor Keuangan Komersial Syariah Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Perumusan SKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
2	Perumusan SKKNI Bidang Pembiayaan Korporasi dan Sindikasi pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
3	Perumusan SKKNI Bidang <i>International Trade and Finance</i> pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
4	Perumusan SKKNI Bidang <i>Wealth Management</i> pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
5	Perumusan SKKNI Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) pada Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
6	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Bank Umum Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BUS, UUS, asosiasi perbankan syariah, KNEKS
7	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Unit Usaha Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BUS, UUS, asosiasi perbankan syariah, KNEKS
8	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BPRS, asosiasi BPRS, KNEKS
9	Perumusan SKKNI Aktivitas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		Industri BPRS, asosiasi BPRS, KNEKS
10	Perumusan SKKNI Ahli Pasar Modal Syariah (ASPM)	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
11	Perumusan SKKNI Ahli Pengelola Syariah Online Trading System (SOTS)	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
12	Perumusan SKKNI Manajer Investasi Portfolio Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah

13	Perumusan SKKNI Manajer Investasi Portfolio Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
14	Perumusan SKKNI Ahli Underwriter Sukuk dan Surat Berharga Lainnya	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
15	Perumusan SKKNI Bidang Pendampingan Calon Perusahaan Penerbit Efek Syariah pada Pasar Modal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
16	Perumusan SKKNI Bidang Pemingkatan Efek Syariah Pasar Modal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
17	Perumusan SKKNI Bidang Manajemen Investasi Pengelola Reksa Dana pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
18	Perumusan SKKNI Bidang Penjaminan Emisi Efek Syariah pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
19	Perumusan SKKNI Bidang Pemasaran Efek Syariah pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
20	Perumusan SKKNI Ahli Penilai Efek Syariah pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
21	Perumusan SKKNI Jaringan Sistem Elektronik yang Bersifat Terbuka pada Pasar Modal Syariah		<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
C	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Keuangan Komersial Syariah				
22	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang perbankan syariah melalui sertifikasi kompetensi perbankan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
23	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang pasar modal syariah melalui sertifikasi kompetensi pasar modal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
24	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang IKND syariah melalui sertifikasi kompetensi IKNB syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
D	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Keuangan Komersial Syariah				
25	Jumlah SDM di sektor perbankan syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang perbankan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah

26	Jumlah SDM di sektor pasar modal syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pasar modal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
27	Jumlah SDM di sektor IKNB syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang IKNB syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
E	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Keuangan Komersial Syariah				
28	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Keuangan Komersial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
29	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LPS P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor keuangan komersial syariah semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
30	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Perbankan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
31	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Pasar Modal Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
32	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor IKNB Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
F	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Keuangan Komersial Syariah				
33	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Keuangan Komersial Syariah Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Keuangan Komersial Syariah dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
34	Pendirian Sharia Corporate University yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
35	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor keuangan komersial syariah (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah

	diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University				
36	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor keuangan komersial syariah yang akan diintegrasikan ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
37	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenaker, Kemendibud Ristek, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
38	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor keuangan komersial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenaker, KSP, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
39	Jumlah SDM sektor perbankan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri perbankan syariah, asosiasi perbankan syariah
40	Jumlah SDM sektor pasar modal syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri pasar modal syariah, asosiasi pasar modal syariah
41	Jumlah SDM sektor IKNB syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri IKNB syariah, asosiasi IKNB syariah
G	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Keuangan Komersial Syariah				
42	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Keuangan Komersial Syariah untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
43	Pemetaan bidang keuangan komersial syariah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
44	Pemetaan talenta sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah,

					asosiasi keuangan komersial syariah
45	Pembinaan talenta global sektor keuangan komersial syariah dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Sharia Corporate University, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
46	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor keuangan komersial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BI, OJK, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
47	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Sharia Corporate University, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, Kemenkominfo, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
H	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Keuangan Komersial Syariah				
48	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
49	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu keuangan komersial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
50	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu keuangan komersial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
51	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu keuangan komersial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
51	Fasilitasi pembangunan platform learning management system kluster keuangan komersial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi

52	Pembuatan materi edukasi melalui literasi perbankan syariah pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
53	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster keuangan komersial syariah yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
54	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, success story solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS kluster keuangan komersial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
55	Profiling peta profesi yang mengalami disrupsi dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
56	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri Keuangan Komersial Syariah				KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemen BUMN, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi



RENCANA AKSI KLUSTER KEUANGAN SOSIAL SYARIAH

Rencana Aksi kluster keuangan sosial syariah disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022-2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2024, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHUN			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A	Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Keuangan Sosial Syariah				
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Ziswah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswah, organisasi masyarakat pengelola Ziswah, asosiasi
2	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor dana haji Syariah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswah, organisasi masyarakat pengelola Ziswah, asosiasi
3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di lembaga keuangan mikro syariah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswah, organisasi masyarakat pengelola Ziswah, asosiasi
4	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Ziswah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswah, organisasi masyarakat pengelola Ziswah, asosiasi
5	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor dana haji	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswah, organisasi masyarakat pengelola Ziswah, asosiasi
6	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di lembaga keuangan mikro syariah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Baznas, BWI, pelaku sektor Ziswah, organisasi masyarakat pengelola Ziswah, asosiasi
B	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Keuangan Sosial Syariah				
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi Ziswah, pengelolaan dana haji, dan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan analisis KLBI 2020	☑			KNEKS, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi Ziswah, pengelolaan dana haji, dan lembaga keuangan mikro syariah	☑			KNEKS, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah

	berdasarkan identifikasi kebutuhan industri keuangan sosial syariah				
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi Ziswah, pengelolaan dana haji, dan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) industri keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan
C	Penyusunan SKKNI Sektor Keuangan Sosial Syariah Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Pengembangan SKKNI Amil Zakat	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
2	Pengembangan SKKNI Nazhir	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
3	Perumusan SKKNI Bidang Manajemen Risiko Keuangan Mikro Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
4	Perumusan SKKNI Bidang Pembiayaan Mikro Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
5	Perumusan SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
6	Perumusan SKKNI Bidang Bank Wakaf Mikro	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
7	Perumusan SKKNI Pengelola BMT	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan mikro syariah, asosiasi keuangan mikro syariah
C	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Keuangan Sosial Syariah				
8	Jumlah SDM di sektor Ziswah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang Ziswah melalui sertifikasi kompetensi Ziswah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Organisasi Ziswah, asosiasi Ziswah
9	Jumlah SDM di sektor pengelolaan dana haji yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Pengelola dana haji, asosiasi keuangan sosial syariah

	pengelolaan dana haji melalui sertifikasi kompetensi pengelolaan dana haji				
10	Jumlah SDM di sektor lembaga keuangan mikro syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang LKMS melalui sertifikasi kompetensi LKM syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		industri LKM syariah, asosiasi LKM syariah
D	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Keuangan Sosial Syariah				
11	Jumlah SDM di sektor Ziswah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang Ziswah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
12	Jumlah SDM di sektor pengelolaan dana haji yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pengelolaan dana haji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
13	Jumlah SDM di sektor LMKS yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang LMK syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
E	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Keuangan Sosial Syariah				
14	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Keuangan Sosial Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
15	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LPS P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor keuangan sosial syariah semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
16	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Ziswah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
17	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Pengelolaan Dana Haji	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
18	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor LKMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BNSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
F	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Keuangan Sosial Syariah				
19	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Keuangan Sosial Syariah Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Keuangan Sosial Syariah dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
20	Pendirian Sharia Corporate University yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian,

	Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan sosial syariah				Kemenkeu, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
21	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor keuangan sosial syariah (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
22	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor keuangan sosial syariah yang akan diintegrasikan ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
23	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen BUMN, Kemenaker, Kemendibud Ristek, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
24	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor keuangan sosial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen BUMN, Kemenaker, KSP, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
25	Jumlah SDM sektor Ziswah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, pengelola Ziswah, asosiasi keuangan sosial syariah
26	Jumlah SDM pengelolaan dana haji yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, pengelola Ziswah, asosiasi keuangan sosial syariah
27	Jumlah SDM sektor LKMS yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, BPKH, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
G	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Keuangan Sosial Syariah				
28	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Keuangan Sosial Syariah untuk mendukung Manajemen Talenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud

	Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah				Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
29	Pemetaan bidang keuangan sosial syariah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, Kemen BUMN, Kemen Perindustrian, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
30	Pemetaan talenta sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kemenag, Baznas, BWI, Kemen BUMN, Kemenkeu, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah
31	Pembinaan talenta global sektor keuangan sosial syariah dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Sharia Corporate University, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
32	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor keuangan sosial syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, BI, OJK, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
33	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Sharia Corporate University, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, Kemenkominfo, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah
H	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Keuangan Sosial Syariah				
34	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
35	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu keuangan sosial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, K Kemenag, Baznas, BWI, emendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
36	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu keuangan sosial syariah dengan	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial

	kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan sosial syariah				syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
37	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu keuangan sosial syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
38	Fasilitasi pembangunan platform <i>learning management system</i> kluster keuangan sosial syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
39	Pembuatan materi edukasi melalui literasi keuangan sosial syariah pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
40	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster keuangan sosial syariah yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
41	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, <i>success story</i> solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS kluster keuangan sosial syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi
42	Profiling peta profesi di sektor keuangan sosial syariah yang mengalami disrupsi dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Baznas, BWI, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan sosial syariah, asosiasi keuangan sosial syariah, perguruan tinggi



RENCANA AKSI KLUSTER INDUSTRI HALAL

Rencana Aksi kluster industri halal disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022-2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2024, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHUN			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A	Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Industri Halal				
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Makanan dan Minuman Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri makanan dan minuman halal, asosiasi makanan dan minuman halal
2	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Pariwisata Ramah Muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri pariwisata ramah muslim, asosiasi pariwisata
3	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Zona Industri dan Kawasan Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Zona Industri dan KIH, asosiasi industri halal
4	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Pengolahan Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri Pengolahan Halal, asosiasi industri pengolahan halal
5	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Industri Kesehatan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri Kesehatan Syariah, asosiasi industri kesehatan syariah
6	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Lembaga Pemeriksa Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, lembaga pemeriksa halal, asosiasi pemeriksa halal
7	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di Rumah Potong Hewan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, rumah potong hewan halal, asosiasi pemotongan hewan halal
8	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor UMKM Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UMKM, UMKM halal, asosiasi UMKM halal
9	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Industri Makanan dan Minuman Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri makanan dan minuman halal, asosiasi makanan dan minuman halal
10	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Pariwisata Ramah Muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri pariwisata ramah muslim, asosiasi pariwisata

11	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Zona Industri dan Kawasan Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Zona Industri dan KIH, asosiasi industri halal
12	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Industri Pengolahan Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri Pengolahan Halal, asosiasi industri pengolahan halal
13	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Industri Kesehatan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Industri Kesehatan Syariah, asosiasi industri kesehatan syariah
14	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Lembaga Pemeriksa Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, lembaga pemeriksa halal, asosiasi pemeriksa halal
15	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di Rumah Potong Hewan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, rumah potong hewan halal, asosiasi pemotongan hewan halal
16	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di UMKM Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kemenkop UMKM, UMKM halal, asosiasi UMKM halal
B	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Industri Halal				
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi industri halal berdasarkan analisis KLBI 2020	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi industri halal berdasarkan identifikasi kebutuhan industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, industri halal, asosiasi industri halal
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi industri halal berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi Internasional (SKI) industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, industri halal, asosiasi industri halal
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, BNSP, Kementerian Ketenagakerjaan
C	Penyusunan SKKNI Sektor Industri Halal Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Perumusan SKKNI Bidang Industri Makanan dan Minuman Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

2	Perumusan SKKNI Bidang Pariwisata Ramah Muslim	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Perumusan SKKNI Bidang Zona Industri dan Kawasan Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Perumusan SKKNI Bidang Industri Pengolahan Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Perumusan SKKNI Bidang Industri Kesehatan dan Farmasi Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Perumusan SKKNI Bidang UMKM Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
C	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Industri Halal				
1	Jumlah SDM di sektor industri makanan dan minuman halal yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang industri makanan dan minuman halal melalui sertifikasi kompetensi industri makanan dan minuman halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Jumlah SDM di sektor industri pengolahan halal yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang industri pengolahan halal melalui sertifikasi kompetensi industri pengolahan halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Jumlah SDM di sektor pariwisata ramah muslim yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang pariwisata ramah muslim melalui sertifikasi kompetensi pariwisata ramah muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
D	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Industri Halal				
1	Jumlah SDM di sektor industri makanan dan minuman halal yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang makanan dan minuman halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Jumlah SDM di sektor pariwisata ramah muslim yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang pariwisata ramah muslim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Jumlah SDM di sektor industri pengolahan halal yang mengikuti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes,

	sertifikasi kompetensi bidang industri pengolahan halal				BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
E	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Industri Halal				
1	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LPS P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor industri halal semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
F	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Industri Halal				
1	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Industri Halal Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Industri Halal dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pendirian Sharia Corporate University yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor Industri Halal (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

4	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor Industri Halal yang akan diintegrasikan ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor Industri Halal yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
7	Jumlah SDM sektor Industri Halal yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
G	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Industri Halal				
1	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Industri Halal untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
2	Pemetaan bidang Industri Halal yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Pemetaan talenta sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Pembinaan talenta global sektor Industri Halal dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor Industri Halal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor Industri Halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
H	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Industri Halal				
1	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal

2	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu industri halal dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu industri halal dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
4	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu industri halal dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
5	Fasilitasi pembangunan platform learning management system kluster industri halal yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu industri halal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
6	Pembuatan materi edukasi melalui literasi industri halal pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
7	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster industri halal yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
8	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, <i>success story</i> solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS industri halal syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
9	Profiling peta profesi yang mengalami disrupsi dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal
10	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri halal				KNEKS, Kemenag, Kemeperin, Kemenparekraf, Kemenkes, BNSP, industri halal, asosiasi industri halal



RENCANA AKSI KLUSTER BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH

Rencana Aksi kluster bisnis dan kewirausahaan syariah disusun berdasarkan kebutuhan spesifik SDM dan berbagai tantangan yang harus dilakukan selama kurun waktu tahun 2022-2024, terutama untuk mewujudkan visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2024, yakni sebagai berikut.

NO	URAIAN	TAHUN			PEMANGKU KEPENTINGAN
		2022	2023	2024	
A	Pemetaan Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Pemetaan kesesuaian kualifikasi pendidikan SDM yang bekerja di sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pendataan perkiraan jumlah SDM syariah yang bekerja di sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	☑	☑		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
B	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Pemetaan kebutuhan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan analisis KLBI 2020	☑			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pemetaan kebutuhan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan identifikasi kebutuhan industri halal	☑			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
3	Pemetaan kebutuhan kompetensi bisnis dan kewirausahaan syariah berdasarkan adaptasi Standar Kompetensi	☑			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi

	Internasional (SKI) bisnis dan kewirausahaan syariah				dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Penyusunan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
5	Konvensi nasional perumusan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
6	Penetapan RIP SKKNI, SKK, dan SKI bidang bisnis dan kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
C	Penyusunan SKKNI Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Berdasarkan Kebutuhan Industri dan KBLI 2020				
1	Perumusan SKKNI Bidang Bisnis Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Perumusan SKKNI Bidang Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
D	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Jumlah SDM di sektor bisnis syariah yang mengikuti program penyetaraan kompetensi bidang bisnis syariah melalui sertifikasi kompetensi bisnis syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Jumlah SDM di sektor kewirausahaan syariah yang mengikuti program	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kementerian

	penyetaraan kompetensi bidang kewirausahaan syariah melalui sertifikasi kompetensi kewirausahaan syariah				Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
E	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Jumlah SDM di sektor bisnis syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang bisnis syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Jumlah SDM di sektor kewirausahaan syariah yang mengikuti sertifikasi kompetensi bidang kewirausahaan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
F	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Bisnis dan Keuangan Syariah				
1	Kajian pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pemetaan jumlah eksisting dan kebutuhan LPS P1, P2, dan P3 untuk mendukung peningkatan profesionalitas pelaku usaha sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah syariah semenjak di perguruan tinggi hingga di tempat kerja ataupun berwirausaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
3	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
5	Fasilitasi pendirian LSP P1, P2, dan P3 sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian

					Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
G	Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Bisnis dan Keuangan Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Pusat Pengembangan Kompetensi Sektor Bisnis dan Keuangan Syariah Terintegrasi yang dimanfaatkan oleh Seluruh Pelaku Usaha pada Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah dari berbagai tingkatan pelaku usaha	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pendirian Sharia Corporate University yang terintegrasi dengan seluruh Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah yang program, bentuk pengembangan, dan sumber belajarnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor Bisnis dan Keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Penghimpunan materi, sumber belajar, dan bentuk pengembangan kompetensi pada sektor Bisnis dan Keuangan syariah (modul belajar, video tutorial, paket pengembangan kompetensi online, daftar pengembangan kompetensi yang diselenggarakan industri, dsb) yang akan diinstalasi ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
5	Inisiasi pembangunan platform belajar syariah untuk sektor Bisnis dan Keuangan syariah yang akan diintegrasikan ke dalam Sharia Corporate University	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
6	Pemetaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan/atau Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Syariah untuk sektor Bisnis dan Keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
7	Inisiasi pembangunan platform Pelatihan dan Kursus Syariah untuk sektor Bisnis dan Keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh penerima peserta Kartu Pra Kerja	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

8	Jumlah SDM sektor Bisnis dan Keuangan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
9	Jumlah SDM sektor Bisnis dan Keuangan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
10	Jumlah SDM sektor Bisnis dan Keuangan syariah yang mengikuti pelatihan klasikal maupun daring	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
H	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Bisnis dan Kewirausahaan Syariah				
1	Inisiasi Pembentukan Talenta Nasional Sektor Bisnis dan Keuangan Syariah untuk mendukung Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
2	Pemetaan bidang Bisnis dan Keuangan syariah yang berpotensi untuk mencapai keunggulan talenta global sebagai Bidang Fokus Utama yang akan dikembangkan dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
3	Pemetaan talenta sektor Bisnis dan Keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
4	Pembinaan talenta global sektor Bisnis dan Keuangan syariah dalam Manajemen Talenta Nasional Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM

5	Pendampingan pencapaian global talent untuk talenta di sektor Bisnis dan Keuangan syariah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
6	Pemetaan, rekrutmen, dan pembinaan digital talent sektor Bisnis dan Keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, OJK, BI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, koperasi, UMKM, asosiasi koperasi dan UMKM
I	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Bisnis dan Keuangan Syariah				
1	Riset dan penyusunan konsep pembangunan pendidikan, pengembangan, dan belajar sepanjang hayat sektor bisnis dan keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
2	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah menengah vokasi untuk bidang ilmu bisnis dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri bisnis dan keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang sekolah vokasi tingkat pendidikan tinggi untuk bidang ilmu bisnis dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri bisnis dan keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
3	Penyelarasan kurikulum pendidikan formal jenjang S1, S2, dan S3 untuk bidang ilmu bisnis dan keuangan syariah dengan kompetensi pelaksanaan tugas industri bisnis dan keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
4	Fasilitasi pembangunan platform <i>learning management system</i> kluster bisnis dan keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah menengah vokasi, sekolah vokasi, S1, S2, dan S3 penyelenggara program pendidikan disiplin ilmu bisnis dan keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi

5	Pembuatan materi edukasi melalui literasi bisnis dan keuangan syariah pada kelompok usia 0 – 6 tahun; 7 – 12 tahun; 13 – 15 tahun; 16 – 18 tahun; 19 – 23 tahun; dan 24 – 35 tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
6	Inisiasi pembangunan <i>Knowledge Management System</i> kluster bisnis dan keuangan komersial syariah yang dapat digunakan pelaku industri dan penyelenggara pendidikan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
7	Identifikasi, pengumpulan, dan pengintegrasian model pengetahuan yang dinilai kreatif, inovatif, role model, success story solusi masalah organisasi, dsb yang akan diintegrasikan ke dalam KMS kluster bisnis dan keuangan syariah	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
8	Profiling peta profesi yang mengalami disrupsi dengan program studi yang diselenggarakan SMK, sekolah vokasi, dan perguruan tinggi	<input checked="" type="checkbox"/>			KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi
9	Fasilitasi penyediaan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar (KMMB) yang harus dilaksanakan perguruan tinggi pada industri bisnis dan keuangan Syariah				KNEKS, Kemendikbud Ristek, Kemen BUNN, Kemenaker, Kemenko PMK, industri keuangan komersial syariah, asosiasi keuangan komersial syariah, perguruan tinggi